



Rampung S2, Bikin Sinetron Bermutu

Setelah merampungkan pendidikan S2-nya di luar negeri, Maudy Ayunda berkeinginan membuat sinetron bermutu.

MAUDY mengungkapkan keinginannya tersebut saat berbincang-bincang dengan Wishnutama, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam unggahan video yang beredar di akun Instagram @rumpi_gossip, terlihat Wishnutama bertanya kepada Maudy Ayunda perihal keinginannya untuk membuat sebuah film layar lebar. Ternyata tidak disangka-sangka Maudy justru ingin sekali membuat sinetron yang bermutu. "Aku nggak mau bikin film mas, aku mau bikin sinetron yang nggak membodohi masyarakat," kata Maudy dikutip ANTVklik pada Senin (25/7/2022).

BERSAMBUNG KE HAL. 7....

BBM Bersubsidi

Pertamina minta bantuan Pemkot Palembang terkait pembelian BBM bersubsidi harus mendaftar.

DINAMIKA Hal 4

Sriwijaya FC

Menjadi tim musafir karena tidak ada homebase, Sriwijaya FC tolak tantangan Semen Padang FC.

OLAHRAGA Hal 6

Eddy Santana

Anggota DPR RI dari Gerindra Eddy Santana Putra didukung simpatisannya maju sebagai Cabug.

DEMOKRASI Hal 3



BERSEBELAHAN-Bangunan ruko tempat Panti Pijat Spa Flow yang bersebelahan dengan Masjid Al Ikhlas di Jalan Bintang, Bukit Sangkal, Kalidoni, Palembang.

Ada Pijat Mesum di Samping Masjid

PALEMBANG, BP--Kegiatan prostitusi terselubung di Kota Palembang makin berani. Masyarakat di kawasan Celenatang resah dengan kehadiran panti pijat dalam gedung ruko yang lokasinya bersebelahan dengan masjid.

Keresahan muncul karena diduga panti pijat bernama Flow itu melakukan praktik mesum. Sudah sekitar dua bulan ▶

BERSAMBUNG KE HAL. 7....

Pilkada Halal Tidak Bisa Instan

Penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai aturan dan tidak melanggar sangat diidamkan semua pihak, mulai dari konstituen hingga pelaku politik. Pilkada yang baik akan melahirkan kepala daerah dan legislator yang baik pula.

PALEMBANG, BP - Fakta di lapangan penyelenggaraan pemilu dan pilkada masih menuai kritikan karena banyaknya kecurangan dalam pemilu, khususnya pada 2019. Ini mengugah dosen Ilmu Politik Uni-

versitas Indonesia Chusnul Mar'iyah PhD memunculkan istilah 'Pemilu Halal'.

Pemilu halal maksudnya pemilu jujur tanpa politik uang, menjalankan regulasi dengan baik, pengawasan yang ber-

jalan maksimal, penyelenggara bekerja sesuai aturan dan pelaku politik siap menang dan siap kalah.

Istilah pemilu halal ini dipahami beragam pihak, ada yang tidak mau menggunakan istilah ini, ada yang juga menerjemahkan atau memberi sinonim lain dari istilah ini.

Sebenarnya konsep pemilu halal sudah dicanangkan sejak dulu di zaman Orde Baru; asas pemilu di Indonesia menganut asas 'LUBER' singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, dan Jurdil singkatan (jujur dan adil).

"Hati-hati menggunakan istilah, istilah halal ini sensitif menurut saya dan bisa saja menimbulkan kontroversi. Seolah-olah pemilu sebelumnya tidak halal, dan proses yang kita lalu dulu haram. Pemilu disandingkan dengan kata halal rasanya tidak pas," kata anggota DPRD Kota Palembang dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hj Yulfa Cindosari, saat diwawancara Beritapagi, Rabu (27/7).

Tetapi jika definisi yang dimaksud pemilu yang bersih, maka secara aturan dan regulasi menurutnya sudah baik

semua, tinggal bagaimana pelaksanaan di lapangan. Penyelenggara pemilu mungkin sulit untuk melanggar karena ada konsekuensinya, namun kembali ke perilaku individu penyelenggara pemilu ataupun obyek pemilu dan pelaku individu sendiri.

Yulfa mendukung pemilu bersih, maka prosesnya, pelakunya, penyelenggaranya dan yang terjun di politik harus memiliki pemahaman yang baik demi kebaikan daerah di masa akan datang. ▶

BERSAMBUNG KE HAL. 7....

Jujur dan Adil

EDITORIAL

TERMINOLOGI 'Pemilu Halal' mulai menggeliat, dipromosikan oleh Chusnul Mar'iyah, Phd, pakar dari Universitas Indonesia, pada Diskusi Politik di Kota Palembang tanggal 20 Juli 2022 dengan topik 'Pemilu untuk Apa'. Kata halal jika disandingkan dengan kata Pemilu kelihatannya tidak matching, tetapi mengandung makna yang hakiki. Kata halal lazimnya berpadu dengan kata rezeki atau makanan, 'Rezeki Halal atau Makanan Halal'.

Halal ini dikandung maksud rezeki atau makanan tersebut diperoleh oleh orang dengan cara baik dan benar, serta digunakan untuk tujuan yang baik dan benar pula. Halal secara umum artinya dibenarkan, lawannya haram yang artinya dilarang atau tidak dibenarkan menurut aturan atau syariat.

Pemilu Halal, termasuk untuk Pilpres, Pileg dan Pilkada, secara tersirat sudah ada dalam enam asas Pemilu, yakni Jujur dan Adil. Jujur memiliki arti bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, setiap elemen mulai dari penyelenggara, yang dipilih dan pemilih harus bersikap jujur sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Adil memiliki arti bawa setiap pemilih dan partai politik harus mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan. ▶

BERSAMBUNG KE HAL. 7....

Ladas...



Kalu Rezeki Dak Kemano

PASTILAH Paul Grisham yang berasal dari California sano dak bakal nyangko kalu kelepehnyo yang ilang 53 taun lewat bakal ketemu lagi. Dio keilangan kelepehnyo di Antartika bulan Oktober taun 1967.

Waktu itu Paul Grisham maseh jadi tentera Angkatan Laut Amerika Serikat. Dio dewek sebenerny sudah lupu kalu pernah keilangan kelepehnyo itu.

"Aku terkejut nian. Padahal memang selamo ini masih becarian, walau mak ini sudah lupu," ujinyo.

Kelepehnyo itu ditemuke 2014 saat wong lagi bongkar stasiun Mc Murdo di Pulau Ross Antartika. Cakmano pacak wong tau itu puny Paul? Ruponyo di jero kelepehnyo itu masuh ado Sim dan kartu anggota Angkatan Laut Amerika Serikat. ▶

BERSAMBUNG KE HAL. 7....



UNJUK RASA-Sejumlah massa kembali mendatangi kantor Gubernur Sumsel menyuarakan tuntutan pergantian Direktur PT Jakabaring Sport City.

Massa Kembali Geruduk Kantor Gubernur

PALEMBANG, BP- Sejumlah massa dari Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Germaki) Sumsel menggelar aksi unjuk rasa di kantor Gubernur menuntut pergantian Direktur PT Jakabaring Sport City, Rabu (27/7).

Menurut Ketua Umum Germaki Umar Yuli Abas, pihaknya sengaja mendatangi Gubernur

untuk memberikan kritik konstruktif agar keberadaan PT JSC dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumsel. Pihaknya juga menyayangkan menyusutnya aset senilai Rp35 miliar per tahun.

"Penyusutan aset ini sangat disayangkan, termasuk juga kami menyoroti adanya tiga

komisaris PT JSC yang berstatus pegawai negeri sipil serta tidak profesional dalam mengelola perusahaan tersebut," ujar Umar Yuli Abas.

Dalam aksi yang berjalan tertib ini dibacakan tuntutan, antara lain merombak manajemen PT JSC mulai ▶

BERSAMBUNG KE HAL. 7....

Berkat Dodi, Limbah Gambir Dikenal Dunia

KABUPATEN Musi Banyuasin, tepatnya di Desa Toman merupakan sentra gambir yang dikenal dengan 'Gambo'. Kebun gambir diperkirakan sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu, bahkan sebelum masa Pemerintahan Belanda. Produksi getah gambir menjadi andalan masyarakat sebelum adanya perkebunan karet dan kelapa sawit. Namun masih ada masyarakat yang menanam gambir sebagai tanaman sela.

Selain itu, dengan banyaknya penyulingan minyak pada sumur tua peninggalan Belanda, masyarakat setempat banyak yang menelantarkan kebun gambir. Dalam proses produksi men-

ghasilkan gambir terdapat air berwarna merah yang tidak ada nilainya, dibuang saja dapat sebagai sumber polusi lingkungan. Sejak tahun 2017, Dodi Reza Alex Noerdin, ketika menjabat Bupati Musi Banyuasin, bersama isterinya Thia Yufada Dodi Reza, yang

DOKUMENTARI

ketika itu sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, berinisiatif untuk memanfaatkan limbah cair getah gambir menjadi zat pewarna batik.

Petani gambir, yang kemudian sebagian menjadi pengrajin batik, dibina untuk meman-

fatkan zat pewarna sebagai bahan dasar pewarna batik khas beraneka corak dan warna yang dikenal dengan "Kain Batik Jumputan Gambo Muba".

Jumputan Gambo Muba, sejalan dengan promosi yang gencar, langsung mendapatkan tempat di hati masyarakat. Penggunaan bahan pewarna alami bebas bahan kimia disertai kualitas warna yang khas menjadi daya tarik tersendiri.

Dodi Reza terus mengembangkan dan mempromosikan Gambo, sebagai produk eco fashion, salah satu identitas Kabupaten Muba ▶

BERSAMBUNG KE HAL. 7....



BATIK GAMBO-Dodi Reza dan istrinya, Thia Yufada, bersama Putri Indonesia saat promosi batik Gambo Muba pada 2020.

BP/DOK

Membuang Daki Pilkada DKI

PEMILIHAN kepala daerah DKI Jakarta 2017 memang fenomenal. Pilkada lingkup daerah khusus, lebih kecil dari rata-rata provinsi, namun menyedot perhatian masyarakat seluruh negeri dan menjadi gempar nasional.

Telah lima tahun berlalu, Pilkada di Ibukota ini toh masih menyisakan berbagai persoalan penting yang membutuhkan solusi komprehensif agar ke depan masalah serupa tidak terulang dan menular ke pemilu kepala daerah lain atau bahkan pemilu presiden seperti sudah terjadi pada 2019.

Pilkada DKI memunculkan stigma politik identitas. Saudara kandung politik aliran ini seperti virus yang menyebar dalam kegiatan pemilihan umum. Politik identitas boleh jadi jalan yang indah pada satu sisi, namun menjadi momok bagi kehidupan masyarakat negeri pada banyak sisi.

Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 menghadapkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan lawan politiknya, Anies Baswedan. Kontestasi kedua belah pihak mencapai puncaknya ketika Ahok digembosi dengan kasus yang oleh media-media luaran disebut 'penistaan agama'.

Gelombang umat Islam berdebur. Serangkaian aksi diinisiasi beberapa kelompok muslim menunjukkan kekuatan massa sebagai respons atas kasus itu. Aksi ini tidak terlepas dari kemungkinan politik tertentu, namun dampak dari ini semua adalah bagaimana kemudian politik identitas menjadi fenomena baru yang mengejutkan di Indonesia.

Dari hasil kajian atau analisis terhadap Pilkada Jakarta 2017 yang dilakukan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagaimana dirilis pada 2020, ada beragam persoalan sebelum, selama, dan sesudah penyelenggaraan Pilkada. Persoalan-persoalan tersebut mulai dari isu politik identitas hingga bermacam-macam pelanggaran Pilkada dan juga masih banyak persoalan lainnya.

"Beragam persoalan dalam Pilkada Jakarta perlu mendapatkan perhatian serius agar ke depan mampu diperbaiki guna penyelenggaraan Pilkada yang lebih bagus lagi. Selain pula sebagai proses pembelajaran bagi Pilkada wilayah lainnya," ungkap Ridho Imawan Hanafi, Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI yang juga salah satu Tim Peneliti Analisis Pilkada Jakarta 2017.

Dari beragam persoalan ini, Tim Peneliti Analisis Pilkada Jakarta 2017 dari Pusat Penelitian Politik yang beranggotakan, antara lain Aisah Putri Budiatri, Devi Darmawan, Diandra Megaputri Mengko, Esty Ekawati, Irine Hiraswari Gayatri, Nostalgia Wanyudhi, Ridho Imawan Hanafi, Sarah Nuraini Siregar, Sri Yanuarti, dan Wasisto Raharjo Jati memberikan sembilan saran perbaikan agar bisa diimplementasikan untuk perbaikan Pilkada di Indonesia di masa mendatang. Adapun berbagai perbaikan yang dapat dilakukan, antara lain:

Pertama, bagi partai politik, seleksi kandidat di internal merupakan perwujudan dari demokrasi internal di partai. Untuk itu, perlu melibatkan kader atau anggota partai dan dilakukan dengan transparan, sehingga kandidat yang muncul tidak ditentukan hanya oleh elite politik dan bisa dilihat rekam jejaknya. Partai juga bisa melakukan

semacam pemilihan pendahuluan di internal. Selain itu, sudah semestinya partai mengoptimalkan kaderisasi sehingga partai akan lebih siap menyiapkan kader mereka dalam menghadapi Pilkada.

Kedua, untuk penyelenggara Pilkada, harus memperkuat independensi dan netralitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karenanya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) harus lebih aktif memantau kinerja penyelenggara. Penyelenggara pemilu dan DKPP harus mendukung masyarakat secara aktif untuk memanfaatkan mekanisme komplain yang ada, sehingga menumbuhkan kesadaran publik terhadap potensi pelanggaran dan kecurangan dalam Pilkada. Penyelenggara pemilu dan DKPP memanfaatkan seluruh aduan yang diberikan masyarakat sebagai *feed back* atas kinerja mereka.

Ketiga, terkait penyelenggaraan survei Pilkada, maka terdapat dua hal yang direkomendasikan, yakni lembaga survei diharapkan dapat memberikan fokus riset yangimbang antara isu elektabilitas dengan isu-isu yang nonelektabilitas. Kemudian, adanya optimalisasi fungsi pengawasan KPU dan/atau asosiasi lembaga riset untuk melakukan pengawasan secara serius dan berkala, khususnya audit etik dan metodologi.

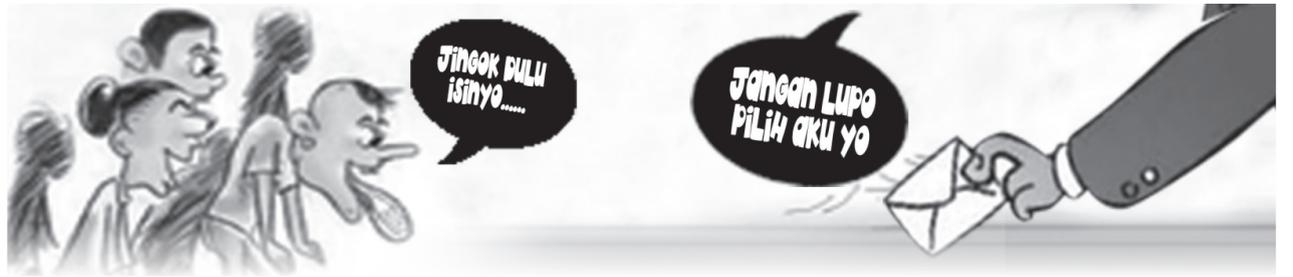
Keempat, untuk mencegah politisasi aktor-aktor keamanan dalam Pilkada, maka Surat Edaran Peraturan Kapolri No. SE/7/VI/2014 yang menunda segala proses hukum terhadap kandidat perlu diberlakukan hingga pemilu selesai. Kedepan, persoalan tersebut perlu diatur secara khusus dalam UU Pilkada.

Kelima, agar menjaga netralitas, pencalonan anggota Polri/TNI dalam Pilkada atau kontestasi jabatan sipil lainnya paling cepat dilakukan dalam satu periode Pemilu (5 tahun) setelah yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatannya di TNI/Polri.

Keenam, supaya menghindari politisasi massa dalam Pilkada, maka perlu aturan yang lebih tegas berkaitan dengan gerakan mobilisasi massa yang besar di luar masa kampanye. **Ketujuh**, terkait dengan media sosial, diperlukan regulasi yang jelas dan tegas dalam penyampaian informasi di media sosial, apalagi terkait dengan maraknya berita-berita *hoax*. Regulasi ini dimaksudkan untuk meniadakan tegas para pembuat atau penyebar *hoax* sehingga ke depan Pilkada atau pemilu tidak terganggu oleh hal seperti *hoax* yang menjadi sarana menyebar kebencian atau intoleransi.

Kedelapan, adalah berkaitan dengan media *mainstream*, perlu mengedepankan independensi dan aspek jurnalisme damai dalam proses pembuatan dan pemuatan berita berdasarkan etika jurnalisme yang berlaku. Perlu adanya kerja sama antara penyelenggara pemilu dan Dewan Pers terkait dengan penegakan etika jurnalistik dan korporasi media.

Dan terakhir alias *kesembilan* adalah berkaitan dengan persoalan maraknya penggunaan politik identitas pada Pilkada 2017, maka tokoh agama, tokoh masyarakat, dan elite-elite politik perlu berperan aktif untuk menjaga harmonisasi antarumat beragama dan kelompok etnis dalam konteks Pilkada. Selain itu, negara perlu mengelola penggunaan simbol-simbol identitas, seperti primordial, religiusitas, dan etnisitas dalam ruang publik maupun ruang privat. #ihd



Pemilu Itu Mahal, Kawan

Pemimpin yang tampil buruk masih lebih baik daripada tidak ada pemimpin. Tidak ada pengikut yang jelek, yang ada pemimpin yang tak cakap.

Saor Silitonga

Kepala KPPN DJJP Kemenkeu

pada Desember 2022.

Ketua KPU berujar, "Kami memang ingin pemilu ini murah. Murah bagi siapapun, murah bagi KPU, murah bagi peserta pemilu. Makanya desain untuk beberapa kegiatan tahapan pemilu itu harus murah bagi siapapun." Rakyat akan memilih pasangan presiden dan wakil presiden, 575 anggota DPR RI, 136 anggota DPD, 2.207 anggota DPR Provinsi, dan 17.610 anggota DPRD Kota/Kabupaten. Mari kita lihat beberapa kuitansi yang harus dibayar untuk perhelatan pemilu di negeri ini.

Pertama, anggaran pemilu pada 2024 Rp76,6 triliun, naik tiga kali lipat dari pemilu 2019 Rp24,8 triliun yang juga naik dari Rp16 triliun pada 2018. Anggaran mengikuti program sehingga diharapkan akan tercapai arah kebijakan pemilu yang meliputi peningkatan kualitas lembaga demokrasi, menjamin hak-hak politik dan kebebasan sipil, mewujudkan birokrasi yang netral dan melaksanakan tahapan pemilu yang aman, menaikkan indeks demokrasi Indonesia yang pada 2018 diperkirakan 74,6% menjadi 75% pada 2019, dan meningkatkan partisipasi pemilih dari 2014 sebanyak 75,1% menjadi 77,5% pada 2019. Anggaran pemilu terbesar disalurkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lembaga tersebut diusulkan mendapatkan jatah anggaran Rp18,1 triliun. Ada tiga output yang disasar dari kegiatan KPU, yaitu pemutakhiran data pemilih pemilu, audit dana kampanye pemilu, dan bantuan hukum penyelesaian kasus pemilu. Kepolisian RI mendapat dana Rp2,3 triliun

DKP RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu menyepakati dana pelaksanaan Pemilu 2024 sebesar Rp76,6 triliun. "Anggaran Pemilu 2024 agar digunakan secara efektif dan efisien serta dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan sejak dimulainya tahapan pemilu," kata Ketua DPR RI (HC) Puan Maharani usai audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta.

Pemilu dijadwalkan serentak pada 14 Februari 2024. Sementara Pilkada serentak dilaksanakan pada 27 November 2024. Pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu ditetapkan pada bulan Agustus 2022. Verifikasi parpol calon peserta pemilu

untuk program pengamanan pemilu dan pasca pemilu. Adapun K/L lainnya yang mendapat anggaran pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mahkamah Konstitusi, dan TVRI.

Kedua, hibah pelaksanaan pemilu. Mari kita cermati catatan Kementerian Keuangan yang melaporkan penerimaan negara dari hibah Pemilu (Bawaslu), Mahkamah Konstitusi, dan TVRI. Kedua, hibah pelaksanaan pemilu. Mari kita cermati catatan Kementerian Keuangan yang melaporkan penerimaan negara dari hibah Pemilu (Bawaslu), Mahkamah Konstitusi, dan TVRI. Kedua, hibah pelaksanaan pemilu. Mari kita cermati catatan Kementerian Keuangan yang melaporkan penerimaan negara dari hibah Pemilu (Bawaslu), Mahkamah Konstitusi, dan TVRI.

Donor dalam negeri terbesar yaitu dari pemerintah daerah berupa kas sebesar Rp10,92 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp8,04 triliun mengalir ke KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI, dan Polri untuk penyelenggaraan Pilkada. Sisanya, sebesar Rp2,36 triliun mengalir untuk kegiatan yang menunjang tugas dan fungsi pada sejumlah kementerian/lembaga.

Ketiga, sumbangan dana kampanye. Pada pemilu 2014, sumbangan dari perseorangan maksimal Rp1 miliar, sedangkan pada Pemilu 2019 naik menjadi Rp2,5 miliar. Dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 2014 tercatat data kampanye sebesar Rp2,1 triliun. Adapun pada LPSDK tahun 2019 hanya Rp427,1 miliar. Total dari dana kampanye senilai Rp427,1 miliar tersebut, sebanyak 79,1% berasal dari sumbangan caleg. Sedangkan parpol hanya berkontribusi 20,9% saja.

Dalam penyusunan suatu laporan keuangan berlaku

ungkapan, "Angka-angka menampilkan wajah, uraian mengungkapkan jiwa." Artinya jika hanya melihat angka-angka pada kuitansi atau dokumen-dokumen anggaran dalam berbagai bentuk otorisasi anggaran niscaya pengguna laporan bisa tersesat ketika ingin memahami makna atau maksud angka-angka tersebut. Untuk itu diperlukan penyelidikan dan pemahaman lebih mendasar dan mencermati kenyataan pada tataran praktik pelaksanaan anggaran pemilu tersebut.

Soal anggaran, politisi adalah konsumen yang paling royal sedunia karena politisi ingin membuat janji politik yang diumbarnya menjadi kenyataan, dan hal itu berarti uang yang tercantum dalam dokumen APBN/APBD. Untuk itu amat diperlukan suatu tataran praktik pelaksanaan anggaran yang tidak sekadar berbicara output anggaran tetapi mencakup outcome anggaran yang memadai, dan hal itu sepenuhnya ada di tangan para pemimpin Kementerian/Lembaga. Sumber dana sebesar Rp24,8 triliun dan hibah pemilu dari pemda sebesar Rp10,92 triliun tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sehingga mudah ditelusuri.

Untuk maksud pemilu yang murah maka perlu sekali upaya mencari agar diperoleh berbagai bahan dan prosedur yang murah pula. Barangkali ada rapat dan perjalanan dinas yang bisa dipangkas, atau pencatatan data pemilu menggunakan sedikit kertas, dan berbagai hal yang bisa dibuat menjadi murah. Janganlah lupa bahwa bahkan pemerintah daerah yang kebanyakan mengalami hambatan anggaran dalam

mengelola pembangunan infrastruktur harus ikut memberi dukungan dana pemilu.

Selanjutnya angka-angka yang dilaporkan parpol dan para calon wakil rakyat dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang justru menurun signifikan untuk pemilu tahun 2019 cukup mengenyitkan dahi. Dalam berbagai riset ditemukan bahwa paling tidak seorang caleg DPR akan menghabiskan biaya rata-rata kemenangan pemilu sebesar Rp1 miliar, calon DPD sebesar Rp2,5 miliar, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing Rp450 juta dan Rp200 juta. Jika menggunakan data pemilu 2014, maka sebanyak 205.877 caleg telah menghabiskan biaya di kisaran Rp55 triliun. Data hingga Februari 2019 tercatat penerimaan dana kampanye Jokowi dan Prabowo masing-masing Rp130 miliar dan Rp95 miliar.

Ada juga riset yang menemukan bahwa sepertiga pemilih terpapar suap pemilu.

Artinya amat patut diduga banyak dana pemilu yang tidak dilaporkan secara transparan. Begitu banyak area abu-abu bahkan ruang gelap perjalanan berliku setiap rupiah selama proses pemilu. Berapa rupiah yang terhambur namun tak ada di catatan laporan dana pemilu? Aroma busuk tercium di segala tempat, namun tak banyak orang yang peduli asal muasal penyebab bau itu. Mahalnya pemilu karena harus ditebus pula dengan berbagai masalah sosial yang timbul seperti maraknya politisasi agama yang menimbulkan keretakan di akar rumput. Memang, politik itu mahal, kawan. Adakah kita mendapat imbalan setimpal? #

Memupuk Harapan Akan Parpol yang Bebas Korupsi



Wawan Wardiana

Plt. Deputy Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK

korupsi politik ini terjadi di Indonesia.

Masyarakat kita terus dipertontonkan kelakuan buruk para wakil dari partai. Operasi tangkap tangan KPK seakan tak berhenti menjamah orang-orang partai dari seluruh kamar kekuasaan di negeri ini. Sejak KPK berdiri pada 2003, lebih dari 300 anggota parlemen Indonesia telah ditangkap karena korupsi. Lebih dari 20 gubernur, 140 bupati/walikota, 30 menteri, dan banyak lagi tokoh-tokoh politik yang juga dicokok karena korupsi.

Kondisi ini terus terjadi setiap tahun. Melihat kenyataan tersebut, rasanya sulit membayangkan Indonesia memiliki wakil-wakil partai yang berintegritas dan bersih dari korupsi. Padahal, kurang penting apa partai politik bagi iklim demokrasi kita? Demokrasi tidak akan ada tanpa kehadiran parpol. Melalui partai politik, lahirnya para pemimpin nasional, pemimpin daerah, hingga perwakilan rakyat di DPR dan MPR. Dari perwakilan partai

politik inilah lahir berbagai regulasi dan kebijakan-kebijakan untuk kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan masa depan bangsa.

Pada tiap kampanye, parpol memberikan janji-janji semanis madu, mengemis suara untuk memenangkan pemilu. Ada harapan rakyat dari setiap suara yang mereka berikan. Harapan akan kebijakan-kebijakan yang memihak rakyat, memperbaiki kehidupan mereka, dan menyejahterakan bangsa.

Tapi berkali-kali rakyat patah hati, dikhianati orang-orang dari partai yang mereka pilih pada pemilu. Tidak hanya mengabaikan aspirasi pemilih, tapi para koruptor dari partai ini juga menggerogoti uang negara yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat. Korupsi berdampak pada seluruh program pembangunan di negeri ini, mulai dari perbaikan mutu pendidikan hingga kesehatan jadi terganggu, kemiskinan tidak dapat teratasi. Maka, tidak berlebihan jika korupsi di-

katakan sebagai kejahatan luar biasa.

Pada 2016, KPK dan LIPI pernah melakukan riset soal mengapa tokoh pilihan Parpol banyak yang korupsi. Salah satunya adalah karena tidak adanya proses pengkaderan yang jelas. Partai lebih mementingkan popularitas seseorang untuk dipinang sebagai kader dan dimajukan sebagai calon anggota legislatif atau kepala daerah, ketimbang orang-orang yang benar-benar kompeten. Tidak heran jika bermunculan selebritas yang menjadi anggota partai, walau tanpa pengalaman berpolitik sebelumnya.

Penentu lainnya adalah besaran 'mahar politik' yang diberikan seseorang agar bisa diusung partai. Hal ini akhirnya membuat kader-kader potensial di partai tersebut menjadi melempem. Mereka merasa digembosi sehingga banyak yang memilih hengkang.

Selain itu penelitian LIPI dan KPK juga menunjukkan kebanyakan parpol di Indonesia tidak punya sistem

pendidikan dan pelatihan yang layak untuk para kadernya. Masalah integritas dan kapasitas kader bukan jadi hal penting bagi partai untuk memajukan mereka ke bursa pemilu. Kembali lagi, yang utama adalah popularitas atau seberapa besar kontribusi Rupiah mereka untuk partai.

Patut dicermati juga soal transparansi dana partai politik. Dari banyak parpol di Indonesia, hanya lima parpol yang memberikan data keuangan mereka untuk penelitian KPK dan LIPI pada 2019 dengan tepat waktu. Padahal transparansi ini penting untuk menghindari adanya konflik kepentingan atau agenda terselubung dari para donor.

Disusupi agenda lain, partai yang seharusnya memuat idealisme dan gagasan kolektif pendukungnya menjadi melenceng. Tidak ada lagi upaya menyuarakan aspirasi rakyat yang terpenting bagaimana mengisi kantong sendiri atau kas organisasi. #

LEGISLATOR

Syaiful Padli Bukan Kacang Lupa Kulit

PALEMBANG, BP - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) periode 2014-2019 dan 2019-2024 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mgs H Syaiful Padli ST MM tidak ingin menjadi kacang lupa kulit.

Syaiful yang duduk di Komisi V DPRD Sumsel yang membidangi kesejahteraan masyarakat, juga fokus pada bidang kesehatan dan pendidikan. Untuk bidang kesehatan Syaiful memfasilitasi masyarakat agar mendapatkan pelayanan kesehatan, seperti bagi yang tidak punya kartu berobat gratis.

"Kami fasilitasi yang tidak punya kartu berobat gratis, karena itu merupakan program Pemerintah Pusat," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel itu, Rabu (27/7).

Ia mengatakan, saat pertama kali duduk di DPRD Sumsel, Syaiful juga langsung menyediakan ambulans gratis bagi masyarakat sekaligus menepati janji ketika terpilih akan mengayomi masyarakat.

"Kito idak kacang lupu kulitnyo (lupa janji-red). Salah satu bentuk janji kita adalah mobil ambulans. Ambulans itu tidak hanya untuk orang meninggal, tapi juga orang sakit," kata pria kelahiran 26 September 1980 ini.

Menurutnya, mobil ambulans tersebut dipergunakan secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan tanpa dikenakan pungutan, dan ambulans tersebut dibelinya secara pribadi.

Syaiful mengaku, menjadi anggota dewan memiliki kepuasan batin tersendiri apalagi saat dirinya bisa membuat masyarakat tersenyum. Salah satu contoh yang dilakukan di bidang kesehatan, saat memperjuangkan masyarakat tidak mampu yang menangis karena harus membayar biaya rumah sakit sebesar Rp24 juta.

Lalu Syaiful membantu agar bisa ke jalur BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan sehingga tidak jadi membayar.

"Kita perjuangkan sehingga tidak bayar dan mereka menangis terharu. Itu artinya kita hadir untuk masyarakat, ada advokasi dari wakil rakyatnya. Ada kepuasan batin jika bisa membantu orang lain karena tidak selamanya diukur dengan materi," ucap Syaiful.

Menurutnya, bisa saja dirinya hanya memberikan uang, namun uang akan habis begitu saja.

"Kenangannya tidak manis, tapi ketika masyarakat melihat kita memfasilitasi dan advokasi mereka, maka itu menjadi kenangan bagi masyarakat," ujar Syaiful.

Ia menuturkan, fungsi DPRD bukan hanya legislasi, pengawasan dan penganggaran, namun juga fasilitasi dan advokasi. #gus



Mgs H Syaiful Padli ST MM

Anggota DPRD Sumsel dari PKS

Targetkan Pileg Kota Menang Besar

PALEMBANG, BP - Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), menargetkan pada pemilihan legislatif 2024 mendatang khususnya di kota Palembang menang besar.

Demikian diungkapkan Sekretaris DPW Partai Nasdem Sumsel Syamsul Bahri. Ia mengatakan, jelang pemilihan umum legislatif, pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden 2024, pihaknya sudah siap khususnya menghadapi verifikasi pemilu pada Agustus 2022.

Syamsul menjelaskan, Nasdem Sumsel sudah melakukan koordinasi dengan dewan pimpinan pusat Nasdem terkait kesiapan dan target Nasdem Sumsel. "Kami siap 100 persen. Untuk pemilihan legislatif di kota kami target menang besar," kata Syamsul, Rabu (27/7).

Nasdem Sumsel juga siap memaksimalkan perjuangan memenangkan pilkada di Sumsel termasuk puncaknya pada pemilihan Presiden nanti.

Selain itu ia mengungkapkan, telah melakukan evaluasi struktur kepengurusan, dilanjutkan DPW Partai Nasdem Sumsel melakukan perubahan Surat Keputusan (SK) untuk enam Kabupaten/Kota, mulai dari Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Banyuasin, Empat Lawang, Prabumulih, Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Komering Ulu Timur. Perubahan ini karena ada beberapa pengurus yang tidak aktif lagi, pindah partai dan ada yang meninggal dunia.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Nasdem Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sholehien Abuasir menambahkan, untuk OKU Selatan sendiri pada kontestasi pemilihan legislatif mendatang, menargetkan lebih dari empat kursi.

"Pada pileg 2019 lalu kita hanya mampu mendapatkan tiga kursi," ia menuturkan.

Untuk itulah, pada pileg 2024 mendatang pihaknya akan fokus mencari calon legislatif yang benar-benar mau meraih suara, sehingga Nasdem OKUS mendapatkan kursi sesuai target yang diinginkan.

"Untuk meraih kemenangan di pileg 2024 ini, kami terus melakukan konsolidasi secara menyeluruh," ucap dia.

Sholehien sendiri belum memutuskan akan ikut mencalonkan diri di pileg mendatang, masih menunggu instruksi partai.

"Kalau partai menginstruksikan maju maka saya akan maju di pileg," ia memungkasi. #udi

Syamsul Bahri

SEKRETARIS DPW PARTAI NASDEM SUMSEL



BP/ISTIMEWA

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Dapil Sumsel 1, Ir Eddy Santana Putra M.T.

Eddy Santana Didukung Maju Pilkada Gubernur



PALEMBANG, BP - Anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dapil Sumatera Selatan 1, Ir Eddy Santana Putra M.T didukung simpatisannya untuk maju pada pemilihan kepala daerah Gubernur Sumsel 2024 mendatang.

Demikian terungkap dalam video singkat yang beredar di aplikasi pesan WhatsApp Selasa (26/7) malam. Dalam Video berdurasi 12 detik tersebut ada terlihat Eddy Santana diapit simpatisannya, sembari mengepal tangan lalu berteriak dengan yel-yel "Prabowo Presiden! Eddy Santana Gubernur!".

Setelah video tersebut beredar, *BeritaPagi* mencoba mewawancarai langsung

Eddy Santana via telpon, namun tidak dapat dihubungi, pesan whatsApp *BeritaPagi* juga tidak dibalas.

Lalu *BeritaPagi* mencoba mengonfirmasi ini ke dewan penasihat Gerindra Sumsel, Nopran Marjani yang mengatakan, sejauh ini belum ada rapat internal partai mengukung Eddy Santana sebagai calon Gubernur Sumsel dari partai Gerindra.

"Video yel-yel itu mungkin semangat pendukung pak Prabowo agar menjadi Presiden, sekaligus semangat pendukung pak Eddy agar menjadi Gubernur Sumsel," kata Nopran.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan masyarakat Sumsel menginginkan Eddy Santana menjadi Guebrnur,

karena memang sudah berpengalaman, baik menjadi Walikota Palembang dua periode dan saat ini menjadi anggota DPR RI. "Beliau berhasil berprestasi di masanya," ucap Nopran.

Nopran menegaskan, jika video yel-yel dan dukungan simpatisan Eddy Santana itu sah-sah saja, namun secara kepartaian memang belum ada keputusan resmi Partai Gerindra mengukung Eddy Santana untuk menjadi calon Gubernur Sumsel di pilkada 2024 mendatang.

"Partai sedang fokus kepada pemilihan legislatif dan juga pemilihan Presiden," katanya lagi.

Untuk mekanisme apakah Eddy Santana dicalonkan Gubernur atau tidak? akan

ada pembahasan di PAC (pengurus anak cabang), DPC (dewan pengurus cabang) dan DPD (dewan pengurus daerah). "Gerindra juga memiliki banyak kader yang bisa dicalonkan menjadi kepala daerah baik, bupati walikota dan gubernur, baik dari kalangan birokrasi dan swasta," ia menerangkan.

Namun, sebagai penasihat Partai Gerindra Nopran menilai, sosok Eddy Santana memang mumpuni jika dicalonkan menjadi Gubernur Sumsel, karena sarat pengalaman. "Tapi kita belum membahasnya," ia menuturkan.

BeritaPagi juga mencoba meminta tanggapan dari kader Partai Gerindra lain

terkait isu pengusungan Eddy Santana menjadi Gubernur Sumsel, sayangnya beberapa kader belum mau memberikan komentar.

"Untuk ranah ini, kapasitas kami sebagai pengurus DPC tidak sampai ke sana untuk berkomentar. Karena pak Eddy Santana anggota DPR RI, jadi sebaiknya dikonfirmasi ke hirarki yang lebih tinggi. Bisa ke pengurus DPP atau minimal DPD," kata Adzanu Gentar, anggota DPRD Palembang dari fraksi Gerindra.

Senada Anggota DPRD Palembang dari fraksi Golkar lainnya, Abdullah Taufik belum bisa berkomentar. "Mohon maaf, untuk hal ini bukan kapasitas kami," ia memungkasi. #gus

Anita Noeringhati: Perempuan Penting Melek Politik

PALEMBANG, BP - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menilai, kaum perempuan penting meleak atau mengerti politik agar ada peningkatan kapasitas perempuan dalam politik.

Hal ini diungkapkan Ketua DPD KPPI Sumsel yang juga Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati dalam acara sosialisasi partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi tahun 2022 provinsi Sumsel, dengan tema Affirmative Action, Meretas Jalan Perempuan Menuju Parlemen, di Hotel Swarna Dwipa Palembang Selasa (26/7) yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel.

Menurut Anita, untuk mencapai keterwakilan perempuan 30 persen di parlemen, partai politik harus melakukan pendidikan politik kepada kader perempuannya.

"Untuk mengisi keterwakilan perempuan, diperlukan perempuan-perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas. Tidak hanya perempuan yang ha-

nya mengisi kuota saja namun tidak bisa berteriak apa yang diperlukan perempuan," ia menjelaskan.

Politisi Partai Golkar ini berharap pada tahun 2024 keterwakilan perempuan di parlemen 30 persen tercapai.

Ditempat yang sama, Ketua KPU Sumsel Amrah Muslimin mengingatkan soal keterwakilan perempuan di parlemen 30 persen ini. Jika tidak terpenuhi maka KPU akan membatalkan semua calon perdapil tersebut.

"Artinya kan KPU dan Undang-undang dalam hal ini memberikan ruang kepada calon perempuan, paling tidak untuk diberikan ruang untuk menjadi calon. Tinggal bagaimana perempuan-peperempuan yang sudah mencalonkan itu memilih dan menjadikan ruang ini sebagai



BP/DUDY OSKANDAR

PESERTA - Foto bersama para peserta dan Ketua DPD KPPI Sumsel Hj RA Anita Noeringhati pada acara sosialisasi partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi tahun 2022 provinsi Sumsel, di Hotel Swarnadwipa Palembang Selasa (26/7).

sarana mencari strategi politik. Karena memang ruangnya terbuka," kata Amrah.

Menurut Amrah, separuh dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Sumsel 5, 8 juta ternyata 2,4 juta adalah perempuan. Artinya, ruang menjadikan perempuan di parlemen di seluruh Sumsel dan

DPRD RI terbuka.

Untuk saat ini keterwakilan perempuan di parlemen di Sumsel baru mencapai angka 21 persen untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten kota di Sumsel.

"Untuk DPD kita 100 persen semuanya perempuan," ia menerangkan. #udi

Usulan Anggaran Pilkada Sumsel Rp359 Miliar

PALEMBANG, BP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel) mengajukan usulan dua anggaran pilkada Sumsel tahun 2023 dan tahun 2024, kepada Gubernur Sumsel sebesar Rp359 miliar.

"Anggaran Pilkada Sumsel sudah kami usulkan ke pak Gubernur, belum ada tanggapan dari pak Gubernur," kata Ketua KPU Sumsel Amrah Muslimin usai menjadi narasumber dalam acara sosialisasi partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, kewenangan provinsi tahun 2022

provinsi Sumsel, di Hotel Swarnadwipa Palembang Selasa (26/7).

Menurut Amrah, anggaran tersebut untuk rangkaian kegiatan pilkada di Sumsel termasuk membayar panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) seluruh Sumsel. "Itulah anggaran yang paling besar," ucap dia.

Selain itu, ia menerangkan untuk pendaftaran DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten kota akan dimulai pada bulan empat 2023.

"Artinya sebelum bulan empat itu, urusan partai yang



Amrah Muslimin
Ketua KPU Sumsel

menyusunnya. Jadi kami menerimanya bulan April, sebelum April itu partai politik sudah diberikan ruang menyusun daftar calon legis-

latifnya per dapil (daerah pemilihan)," katanya.

Sedangkan untuk Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) akan dimulai Desember 2022, karena pendaftaran DPD itu harus mengumpulkan dukungan dulu KTP, KTP diverifikasi KPU sampai memenuhi syarat minimal, berbeda dengan DPRD.

Sebelumnya, dalam live talk YouTube berjudul Menengurai Simpul Pemilu 2024, Amrah menjelaskan, untuk pemilihan kepala daerah 17 kabupaten/kota ditambah pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, perkiraan APBD yang diusulkan draftnya sekitar Rp1,3 Triliun.

Jika berkaca pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 di tujuh kabupaten, hanya membutuhkan dana ratusan miliar. "Kalau dipukul rata saja Rp40 Miliar, maka total tujuh kabupaten/kota hampir Rp300 Miliar kebutuhan anggarannya," ia menerangkan.

Ia juga menjelaskan, untuk pemilihan umum pembiayaannya 100 persen dari APBN, sementara pemilihan kepala daerah 100 persen dibiayai APBD. #udi#gus

Penjaringan Bujang Gadis Empat Lawang Dimulai



Mgs Nawawi
KEPALA DISPAR EMPAT LAWANG

EMPAT LAWANG, BP – Dinas Pariwisata (Dispar) Empat Lawang, telah membuka pendaftaran Pemilihan Bujang Gadis Empat Lawang (BG4L) sejak awal Juli tadi. Puluhan remaja putra dan putri yang ada di Bumi Saling Keruan Sani Kerawati, sangat antusias.

Kepala Dispar Empat Lawang, Mgs Nawawi mengatakan, mereka yang akan ambil bagian pada pemilihan

ini, tidak hanya berasal dari Kecamatan Tebing Tinggi saja, tapi ada beberapa peserta yang datang dari kecamatan lainnya. Seperti Kecamatan Pendopo, Ulu Musi dan kecamatan lainnya.

“Saat ini masih terbuka buat pendaftar. Namun dengan catatan, harus sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang sudah ditentukan panitia. Persyaratan dimaksud antara lain, usia peserta minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun,” ucapnya.

Syarat lainnya, tentunya mempunyai penampilan menarik, wawasan luas, sehat jasmani dan rohani, mengisi formulir pendaftaran. Selain itu, syarat mutlak lainnya adalah tinggi badan.

“Untuk wanita minimal 163 cm dan Pria minimal 170 cm. Selain syarat-syarat di atas, peserta juga harus menguasai bahasa asing. Mereka yang menguasai bahasa asing, tentunya mempunyai nilai plus tersendiri sebagai bekal mereka,” imbuhnya. #amr

Pimpinan Baznas Gelombang II Resmi Dibuka

SEKAYU, BP – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) melalui Bagian Kesra Setda Muba mengundang Tokoh Agama Islam, Ulama dan Tenaga Profesional terbaik di Muba, untuk mengikuti seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Muba Periode 2022–2027 secara terbuka. Pendaftaran gelombang Kedua ini dilakukan pada 21 Juli - 23 September 2022.

Kepala Bagian Kesra Muba, H Opi Pahlopi mengatakan, mereka yang mengikuti seleksi harus memenuhi beberapa persyaratan. Sebut saja seperti, warga Negara Indonesia (WNI), beragama Islam, bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, berusia minimal 40 tahun (pada saat mendaftar), sehat jasmani dan rohani.

Selain itu, tidak menjadi anggota partai politik, tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, bersedia untuk bekerja penuh waktu, serta tidak merangkap jabatan sebagai pengurus dan atau pegawai pengelola zakat lain.

“Itu persyaratan umumnya. Untuk persyaratan khusus, calon Pimpinan Baznas diutamakan yang memiliki pengetahuan dan berpengalaman dalam mengorganisasi dan mengelola zakat, infak, dan sadaqah. Untuk itu, mereka juga diminta membuat gagasan orisinal mengenai Strategi Pengelolaan Zakat di Jawa Tengah,” bebernya, Senin (25/7).

Ditambahkan, berkas dikirimkan dalam bentuk fisik dan file, selambatnya 23 September 2022. Untuk berkas fisik, dikirimkan ke Panitia Seleksi Calon Pimpinan Baznas Kabupaten Muba, Bagian Kesra Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Muba.

“Syarat selengkapnya dan berkas unduhan bisa dilihat di website <https://Pembak Musi Banyuasin.go.id> atau <https://situs.baznaskabmusibanyuasin.id/>. Keseluruhan tahapan seleksi tidak dipungut biaya. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat. Jika ada pertanyaan, silakan kontak Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Muba kontak person Edy Mahyudin No. HP. 081373980300 dan Azhari, No. HP. 082182031131 (pada hari dan jam kerja),” bebernya.

Diterangkan Opi, tahapan seleksi dimulai dari pengumuman dan pendaftaran pada 21 Juli -23 September 2022, seleksi kompetensi (tertulis dan wawancara) 26 - 30 September 2022, dan terakhir penyampaian hasil panitia seleksi kepada Bupati Musi Banyuasin 3 Oktober 2022. #riz



MENGENAL BBM –
Tampak salah satu karyawan SPBU sedang mengisi BBM pada kendaraan. Pertamina

Palembang Gencarkan Sosialisasi Beli BBM Bersubsidi

PT. Pertamina minta bantuan Pemkot Palembang terkait pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang kini harus mendaftar melalui Website Subsidiempat.mypertamina.id.

PALEMBANG, BP – Dalam mengupayakan penyaluran BBM Subsidi yang tepat sasaran, PT. Pertamina Wilayah Palembang berencana akan segera menerapkan sistem pendaftaran melalui Website Subsidiempat.mypertamina.id, khususnya

bagi pengendara pengguna Peralite dan Bio Solar.

“Saat ini, pihaknya membuat sistem pendaftaran bagi pengguna Peralite dan Bio Solar di Subsidiempat.mypertamina.id. Jadi kita meminta kepada Pemerintah Kota Palembang untuk memonitor penyaluran dalam memonitor penyaluran subsidi juga,” kata Branch Manager Pertamina Wilayah Kota Palembang, Aditya Agung Andrawina usai Audiensi bersama Walikota Palembang, Selasa (26/7).

Disampaikan Aditya, dengan adanya sistem tersebut, kedepan juga dapat lebih mudah dalam memonitor penyaluran BBM Bersubsidi sehingga dapat lebih tepat sasaran. Pihaknya bisa melakukan peng-

awasan lebih mudah jika dengan sistem lewat website.

“Jadi penyaluran BBM ini dapat kita monitor, khususnya Peralite dan Bio Solar,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Walikota Palembang, H. Harnojoyo sangat menyambut baik. Bahkan, Harnojoyo juga menilai, penerapan sistem tersebut mampu membuat penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.

“Kami sangat menyambut baik sekali. Jangan sampai nanti kuota BBM yang bersubsidi yang peruntukannya sudah jelas tapi tiba-tiba didapat mereka yang tidak memenuhi syarat,” ucap Harnojoyo.

Selektif itu memang dibutuhkan, sehingga BBM bersubsidi ini memang benar-benar didapatkan mereka yang memang memenuhi kriteria.

Namun, Walikota Palembang dua periode itu juga menyebutkan, bahwa penerapan sistem tersebut juga dinilai bukanlah suatu hal yang mudah tanpa adanya sosialisasi terhadap masyarakat.

“Tetapi memang untuk mengatasi ini kami pikir tidak bisa secepat membalikkan telapak tangan, jadi memang perlu ada sosialisasi dengan masyarakat,” katanya.

Pemerintah Kota Palembang menjanjikan akan membantu sosialisasi terkait sistem ini. Tentunya diharapkan warga



Aditya Agung Andrawina

Palembang bisa memaklumi dan mengikuti jalur atau pola ini, sehingga bisa mendapatkan BBM bersubsidi.

“Kami sangat menyambut baik sekali,” tungkasnya. #riz

Rumah Sawit Indonesia Mendesak Segera Dibentuk

PALEMBANG, BP – Harga Tandani Buah Segar (TBS) dan ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang masih jadi keluhan petani sawit, membuat Rumah Sawit Indonesia (RSI) yang digagas Harvic HasnuL Qolbi, yang merupakan wakil menteri pertanian RI, mendesak untuk segera dibentuk.

Keberadaan RSI nantinya untuk membantu dan memperjuangkan kepentingan petani sawit. Oleh sebab itu, meski ada protes dari beberapa pihak, diharapkan RSI harus terus diperjuangkan.

Berdasarkan data dari Di-

nas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), harga TBS kelapa sawit untuk periode 1-15 Juli 2022 ditetapkan sebesar Rp1.614,20 per kg untuk umur tanaman 3 tahun. Harga TBS untuk umur tanaman 5 tahun ditetapkan sebesar Rp1.732,14 per kg.

“Jadi saya bingung dan heran, RSI yang baru sebatas ide, dan belum juga ada kegiatan apapun tapi sudah banyak pihak yang kebakaran jenggot, banyak pihak yang protes atas rencana tersebut,” kata Fungsiaris Forum Komunikasi Antar Suku (FK2AS) Erry Gustion SH M.Kn.



Erry Gustion SH M.Kn.

Fungsiaris Forum Komunikasi Antar Suku (FK2AS)

Alumni Lemhannas RI menyampaikan, RSI bisa mengangkat martabat dan harga diri bangsa ini di dunia internasional. Oleh sebab itulah, seharusnya tidak ada alasan untuk protes atau menentang dibentuknya RSI.

“RSI itu nantinya akan menjadi lembaga yang mewakili kepentingan berbagai pihak, masyarakat untuk selalu memberikan kontribusi pemikiran serta menyuarakan kepentingan para petani Sawit Indonesia di dalam meramu berbagai kebijakan yang berkaitan dengan regulasi tata kelola Sawit Indonesia,” ungkapnya. Sawit saat ini adalah ko-

moditas ekonomi yang mempunyai nilai politik penentu di dalam perancangan politik global khususnya dalam bidang energi.

“Produk perkebunan ini kedepan akan menjadi instrumen politik bagi Indonesia dalam perancangan politik global,” ucapnya.

Ia juga berharap agar komoditas sawit jangan dibawa ke arah sana, sehingga para petani sawit dan masyarakat jadi korban.

“Jangan sampai petani jadi korban, dan negara lain mendapatkan keuntungan dari polemik harga sawit ini,” tandasnya. #muk

Produk UMKM Bakal Dipasarkan Bandara SMB II

PALEMBANG, BP – Dalam memperkenalkan beragam produk UMKM di Kota Palembang, Angkasa Pura II rencana akan lakukan kerjasama bersama Pemerintah Kota Palembang.

Hal itu disampaikan langsung oleh Executive General Manager Angkasa Pura II, R Iwan Winaya Mahdar usai Audiensi bersama Walikota

Palembang, H. Harnojoyo di Rumah Dinas Walikota, Jalan Tasik Palembang, Selasa (26/7).

Dikatakan Iwan, beragam kerjasama rencananya akan segera dilakukan, salah satunya yakni melalui program-program Dinas Pariwisata Kota Palembang dengan menampilkan produk UMKM di Bandara SMB II guna me-

manjakan mata.

“Atau mungkin nanti produk-produk UMKM binaan Pemkot bisa dijadikan salah satu oleh-oleh bagi para pengguna jasa atau yang akan terbang melalui SMB II,” kata Iwan.

Disampaikannya bahwa, yang dilakukan tersebut juga merupakan bentuk kolaborasi, komunikasi serta sinergitas antara pihak Angkasa



AUDIENSI – Walikota Palembang Harnojoyo menerima audiensi Executive General Manager Angkasa Pura II, R Iwan Winaya Mahdar, bersama rombongan.

Pura II dan Pemerintah Kota Palembang.

“Akan dibuat semacam pameran, dan nantinya mereka bisa menampilkan produk-produk UMKM me-

reka dan akan bergabung bersama UMKM binaan Angkasa Pura II, namun semuanya tergantung dari rapat teknis yang akan kita lakukan secepatnya,” ucapnya. #riz

Mancing di Sungai Musi, Antara Sampah dan Ikan

JUMAT (22/7/2022) pagi cuaca sangat bersahabat, perahu motor atau biasa disebut getek sudah menepi di kanal sungai Musi, tepatnya belakang pasar Sekanak yang terletak di kawasan 28 Ilir Palembang. Air seperti itu lagi surut, sehingga sedikit menyulitkan untuk turun ke getek.

Megi (38), pengemudi getek, seperti yang sudah spesialis melayani penyuka memancing. Dari pembicaraannya terlihat sangat mengerti rute yang menurutnya banyak ikan atau udang untuk dipancing.

“Alhamdulillah, seminggu ini sudah penuh jadwal kak. Tiap hari nglayani pemancing dari berbagai daerah,” ujarnya. Tempat favorit untuk saat ini



SPOT MANCING - Megi pengemudi getek yang sering menemani para pemancing di kawasan sungai Musi, saat bersama tim koran berita pagi disalah satu spot mancing kawasan Gandus.

menurutnya di Pulokerto yang masih masuk kecamatan Gandus, jarak tempuh sekitar 1 jam perjalanan getek. Atau kalau mau

lebih jauh lagi ke desa Semuntul yang berada di kecamatan Rantau Bayur, Banyuasin.

Mulailah perjalanan me-

nyusuri sungai Musi yang memiliki panjang 720 km atau 450 mil tersebut. Sungai ini hulunya terletak di Bukit

Kelam, Kabupaten Rejang Lebong, sementara hulunya di Sungang yang dekat Selat Bangka.

Melintasi jembatan Musi 6 yang pembangunannya dimulai masa Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, tampak berdiri kokoh menghubungkan Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Sejak adanya jembatan ini masyarakat sangat terbantu dan mengurangi jarak tempuh selama ini yang harus melalui jembatan Ampera lebih dulu.

Tiba di kawasan Pulokerto, pancing mulai dilemparkan ke sungai. Beberapa menit terlihat ada sentakan kecil, diangkat rupanya udang sungai tersangkut mata kail. Beberapa waktu kemudian kembali seekor udang galah dapat diangkat ke perahu,

berukuran lebih besar dari yang pertama.

Lantas, atas saran Megi perahu motor kembali melaju berpindah spot mancing. Benar saja, lokasi kedua ini berhasil mendapatkan beberapa ekor ikan baung atau bahasa latinnya *Hemibagrus* yang termasuk *famili Badridae*.

Dilansir dari Mongabay Indonesia 2018, menurut penelitian pada tahun 2008, sebanyak 620 jenis ikan yang hidup di sungai Musi dan Pesisir Timur Sumatera Selatan. Jumlah ini artinya 13 persen dari 4.748 jenis ikan di Indonesia.

Yang sering bikin kecewa saat mengangkat kail, sering kali dikira umpan dimakan ikan namun saat diangkat hanyalah sampah plastik

bisa bekas kemasan mie instan atau sejenisnya. Sangat disayangkan memang kebiasaan membuang sampah di sungai masih belum hilang sama sekali. Tak jarang pula beragam sampah hilir mudik di permukaan sungai yang memang sangat mengganggu pemandangan.

Perlu terus dilakukan edukasi di tengah masyarakat untuk memelihara kebersihan sungai Musi maupun anak-anak sungai yang banyak mengalir sampai pemukiman. Pemerintah juga baiknya kembali menghidupkan event di sungai. Kekayaan alam ini harus dipelihara dan dikembangkan lebih lanjut agar dapat memberikan manfaat lebih besar lagi. #Kemas Khoirul Mukhlis

Sergap Kapal Motor di Perairan Bunga Karang



DIAMANKAN – Nasrudin alias Nas (43), pelaku yang melakukan pencurian enam seng berhasil ditangkap.

Residivis Curanmor Embat Seng Warga

MURATARA, BP - Dua kali menjalani hukuman kasus curanmor, tidak membuat Nasrudin alias Nas (43) jera. Warga Desa Bina Karya, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Muratara untuk melakukan kejahatan.

Tersangka Nasrudin alias Nas ditangkap jajaran Polsek Karang Dapo, karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) enam keping seng.

Tersangka ditangkap di rumah orangtuanya di Blok D Desa Bina Karya, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Muratara, Minggu (24/7/2022) sekitar pukul 13.00 WIB.

Penangkapan tersangka sesuai dengan LP/B- 17/ VII/2022/SPKT/Sek Krdp/Res Muratara/Polda Sumsel tanggal 24 Juli 2022 dengan korban A Wahid Firmansyah (30). Peristiwa itu terjadi Minggu (24/7) sekitar pukul 01.00, di Desa Bina Karya, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Muratara. Tersangka mengambil seng pada malam hari sebanyak enam keping di belakang rumah pelapor.

Kemudian sendibawa dan disimpan di rumah pelaku, serta sudah dipasang di atap rumah milik tersangka. Akibat tindak pidana pencurian tersebut pelapor merasa tidak senang, dikarenakan seng tersebut merupakan milik bersama masyarakat Desa Bina Karya (Seng milik Persatuan) Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Muratara, yang mana seng Persatuan Milik Desa.

Digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak apabila ada kegiatan warga atau kematian warga, sehingga banyak dari masyarakat yang tidak senang atas kehilangan dan perbuatan tersangka tersebut, kemudian melaporkan tindak pidana pencurian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Karang Dapo.

Kapolres Muratara AKBP Ferly Rosa Putra, S.ik didampingi Kapolsek Karang Dapo AKP Forliamzoms, S.IP, MH bersama Kasi Humas AKP Joni Indrajaya, SH, Rabu (27/7), menerangkan bahwa setelah laporan diterima anggota Polsek Karang Dapo. Selanjutnya Kapolsek Karang Dapo AKP FORLIAMZONS, S.IP, MH memerintahkan Kanit Reskrim IPDA ANDY PRATAMA, SH, MH dan anggota unit Reskrim untuk melakukan penyelidikan.

Setelah diketahui yang mengambil seng tersebut tersangka Nasrudin dan didapatkan Informasi pelaku sedang berada di rumah orang tuanya di Blok D Desa Bina Karya.

Selanjutnya pada Minggu (24/7/2022) sekitar pukul 13.00, dilakukan penangkapan terhadap tersangka di rumah orang tuanya di Blok D Desa Bina Karya. Pada waktu dilakukan penangkapan pelaku berusaha melarikan diri, namun berhasil disergap, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah pelaku dan di dapatkan barang bukti berupa seng sebanyak enam keping yang di curi oleh tersangka yang sudah dipasang di atap rumah milik tersangka. Kemudian pelaku dan barang bukti tersebut dibawa dan diamankan guna di proses lebih lanjut di Polsek Karang Dapo. #hab



JAMBRET – Pelaku jambret Tabrani alias Taf (26) ditangkap anggota Reskrim Polsek Gandus.

Kacanduan Slot Judi Jambret Dibekuk

PALEMBANG, BP – Meski telah pernah di penjara gara-gara melakukan jambret, tak membuat Tabrani alias Taf (26), kapok. Residivis satu ini, kembali berubah karena kecanduan slot judi.

Tabrani kembali melakukan aksi penjambratan di Jalan Sosial, Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus Palembang, Senin (11/7).

“Saat menjambret korban, tersangka menggunakan sepeda motor. Korbannya saat itu sedang berjalan kaki sambil bermain hp. Tersangka dari belakang langsung menarik hp korban,” kata Kapolsek Gandus AKP Wanda Dhiria Bernard, Selasa (26/7).

Setelah beraksi, pelaku kabur dan menjadi buronan selama tiga hari. Selanjutnya, Anggota Reskrim Polsek Gandus berhasil menangkap pelaku.

“Tersangka Tabrani ini merupakan residivis kasus dengan kasus yang sama,” ucapnya.

Berdasarkan pengakuan tersangka, ia melakukan aksi jambret lantaran ketagihan untuk berjudi slot judi. “Karena itulah ia nekat menjambret hp orang demi untuk bermain judi slot,” katanya. #udi

Ratusan Ribu Baby Lobster Ditemukan

Penyelundupan 273.870 ekor benih baby lobster berhasil digagalkan Polda Sumsel. Pemilik kapal dan pelaku berhasil kabur.

PALEMBANG, BP – Sebanyak 273.870 ekor benih baby lobster terdiri dari 265.400 ekor lobster jenis Pasir dan 8.470 ekor lobster jenis Mutiara, diamankan Aparat Dit Polairud Polda Sumatera Selatan (Sumsel) di perairan Bunga Karang, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin.

Wakil Direktur Dit Polairud Polda Sumsel AKBP Zahrul Bawadi menyebut, penyelundupan itu digagalkan dalam operasi penyergapan terhadap sebuah kapal motor yang berada di Perairan Bunga Karang pada Senin (25/7) malam sekitar pukul 23.30 lalu.

“Ini merupakan hasil pengembangan atas aduan informasi yang kami terima pada tanggal 6 Juli 2022. Senin malam kemarin petugas me-



BARANG BUKTI – Polda Sumsel memberikan keterangan pers dan memperlihatkan barang bukti yang berhasil diamankan, Selasa (26/7).

nemukan kapal motor itu di Perairan Bunga Karang,” kata AKBP Zahrul saat merilis kasusnya Selasa (26/7) sore.

Dari kapal motor tersebut, petugas mendapati sebanyak 60 box stereofoam yang saat diperiksa berisi benih baby lobster dalam kantong plastik. Setelah dihitung, total ada sebanyak 273.870 ekor benih

lobster yang tersimpan dalam box tersebut.

“Terdiri dari 265.400 ekor lobster jenis pasir dan 8.470 ekor lobster jenis mutiara. Kerugian ditaksir senilai Rp27,810 miliar, bila penyelundupan lobster itu berhasil diselundupkan,” katanya.

Zahrul menegaskan pihaknya tidak berhasil me-

nyangkap pelaku. Saat ditemukan kapal motor tersebut sudah ditinggalkan begitu saja di perairan sungai.

“Sehingga saat ini kami masih melakukan penyelidikan dengan mempelajari barang bukti yang diamankan,” katanya.

Untuk benih baby lobster, tambah Zahrul, langsung di-

bawa ke Lampung Selatan, untuk dilepaskan oleh Balai Karantina Ikan.

Petugas juga menyita barang bukti lain yakni satu unit kapal motor tanpa nama, satu unit mesin Alkon, satu buah kartu ATM BCA warna hitam, satu buku tabungan BCA Serang atas nama Roni K. #udi

BEGAL – Dua pelaku begal dan barang bukti berupa sajam dan motor yang digunakan saat beraksi berhasil diamankan polisi, Selasa (26/7). IST



Dua Pelaku Begal Digulung Tim Beguyur Bae

PALEMBANG, BP – Dua pekatu begal yang merampas sepeda motor (R2), Ferdiansyah (23) warga Jalan Sungai Tawar III, Kelurahan 29 Ilir, Kecamatan IB II, Palembang, berhasil diringkus Tim Beguyur Bae, Opsnal Unit Ranmor Sat Reskrim Polrestabes Palembang, Selasa (05/10/2021) sekira pukul 01.30.

Pelaku begal itu adalah Mahyudin alias Udin (22), seorang jukir, warga Jalan Talang Karangga, Lorong Darma Bakri, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan IB II, Palembang dan Muhammad Ridho alias Bagong (22), buruh, warga Jalan DI Panjaitan, Lorong Harapan, Kecamatan Plaju, Palembang. Keduanya diamankan di rumahnya masing-masing.

Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Mokhammad Ngajib melalui Kasat Reskrim, Kompol Tri Wahyudi, mengungkapkan, kedua tersangka beraksi di Jalan Dr Suto-mo, tepatnya depan Rumah Dinas TNI AU, Kelurahan Talang semut, Kecamatan

Bukit Kecil, Palembang, Senin (25/7) malam.

Kedua tersangka ini menghentikan laju sepeda motor korban saat melintas di TKP. Lalu, tersangka yang dibonceng mengeluarkan sajam jenis pisau, menyuruh korban berhenti. Lantaran takut akhirnya korban menghentikan motornya.

“Perannya tersangka M Ridho yang membawa sepeda motor, sedangkan tersangka Mahyudin duduk di bonceng. Mereka memepet korban dari arah sebelah kanan, kalau tersangka Mahyudin yang mengeluarkan pisau meminta korban berhenti. Setelah berhenti, Mahyudin langsung merampas motor korban dan membawa pergi,” jelas Kompol Tri Wahyudi.

Sepeda motor hasil curian, menurut pengakuan tersangka, mereka jual di Kabupaten OKU Timur.

“Pengakuannya mereka jual motornya di OKU Timur oleh tersangka Mahyudin seharga Rp1,7 juta dan uangnya di bagi untuk keperluan sehari-hari,” pungkasnya.

Saat ini kedua tersangka berikut barang bukti sudah diamankan di Mapolrestabes Palembang, dan akan di dalam terkait aksinya apakah terlibat aksi di tempat lainnya.

Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti (BB) berupa satu lembar photo copy STNK, sepeda motor honda Scoopy tahun 2019 warna merah hitam No.pol: BG 6970 ACT No.Ka: MH1JM3120KK937667 No.Sin: JM31E2932792 A.n FITRIYANI, satu bilah senjata tajam jenis pisau, satu unit sepeda motor merk honda Genio milik pelaku yang digunakan saat beraksi.

Kedua tersangka pun, telah mengakui perbuatannya sudah melakukan aksi begal pada korban.

“Iya pak kami berdua sudah merampas motor, tugas saya membawa motor dan Mahyudin yang menodongkan pisau ke korban untuk menghentikan motor, lalu motor di jual di OKU Timur seharga Rp1,7 juta uangnya kami bagi dua,” kata M Ridho. #udi

Satu Pemalak di Terminal Karya Jaya Tertangkap

OGAN ILIR, BP – Satu dari delapan pemalak dan pencurian handphone milik sopir mobil pick Up Diki Prianto, di Jalan Raya Palembang-Indralaya depan Terminal Karya Jaya, Desa Ibul Besar 1 Kec. Pemulutan Ogan Ilir, Minggu (24/7) pukul 02.00 berhasil ditangkap.

Pelaku Fitra Anggara ditangkap Team Crocodile Polsek Pemulutan, tak hanya karena melakukan pemalakan pada sopir saja, tapi juga karena melakukan mencuri hp korban.

Kapolsek Pemulutan AKP Herry Yusman, SH didampingi Kanit Reskrim AIPDA Rohman Sumanto, SH menjelaskan, korban Diki Prianto saat itu melintas dari Arah Palembang menuju Indralaya dengan menggunakan Mobil pick Up.

Kemudian korban dihadang delapan orang dan langsung memaksa meminta uang kepada korban. Pada saat korban membuka jendela kaca mobil, pelaku langsung mengambil dua hp milik korban yang berada di dalam mobil.

Pelaku pun langsung kabur meninggalkan korban. atas kejadian tersebut Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp5 juta. Mendapat laporan terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut.

Team Crocodile Polsek Pemulutan diterjunkan saat mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan masih berada di sekitar Terminal Karya Jaya, pada Minggu (24/7) pukul 03.30.

Team Crocodile berhasil mengamankan pelaku Fitra Anggara. Polisi mengamankan uang, di kantong celana pelaku yang sebesar Rp200.000 dari hasil penjualan Hp merk oppo yang telah dicuri dan hp merk Samsung disita dan belum di jual pelaku.

Kemudian pelaku dan barang bukti langsung di bawa dan diamankan ke Polsek Pemulutan untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut. pelaku akan dikenakan melanggar Pasal 365 KUHP dengan Ancaman hukuman di atas Lima tahun Penjara. #don



PELAKU PEMALAKAN – Satu dari delapan pelaku pemalakan berhasil ditangkap Team Crocodile Polsek Pemulutan.

Satlantas OI Mulai Berikan Pelat Putih



PELAT PUTIH - Jajaran Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polres Ogan Ilir menunjukkan salah satu pelat putih yang mulai dikeluarkan pada salah satu kendaraan.

INDRALAYA, BP - Jajaran Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polres Ogan Ilir, mulai

merealisasikan perubahan warna pada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

atau pelat nomor kendaraan.

Perubahan warna pelat nomor polisi (nopol) ini Sesuai Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Kasat Lantas Polres Ogan Ilir, AKP Putu Eka Dhenda Jayanti mengatakan, pihaknya mulai melakukan sosialisasi penggunaan pelat nopol putih di wilayah hukum Polres Ogan Ilir.

“Setiap pergantian TNKB, maka pelat nopol putih akan diberikan,” jelas Kasat Lantas Penerapan plat nopol

dengan warna dasar putih dilakukan untuk sinkronisasi tilang elektronik.

Sehingga, saat terjadi pelanggaran terutama dekat perangkat Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), mudah dideteksi. Sosialisasi pelat nopol ini dilakukan secara langsung, lisan dan tulisan termasuk lewat media sosial.

“Bagi warga yang datang ke Samsat juga kami sampaikan mengenai pergantian warna pelat nopol ini,” terang Kasat Lantas.

Tak hanya kendaraan yang ganti TNKB, kendaraan mu-

tasi masuk dan kendaraan baru juga akan langsung menggunakan TNKB warna dasar putih.

Pelaksanaan penggunaan TNKB warna dasar putih ini akan dilakukan secara bertahap. Sehingga, semua TNKB yang berwarna dasar hitam semuanya diganti sesuai target Korlantas Polri, yakni pada 2027 mendatang.

“Sekarang di Ogan Ilir mulai berjalan dan dilaksanakan secara bertahap. Kendaraan setiap ganti TNKB, langsung diberikan diberikan TNKB warna dasar putih,” jelas Kasat Lantas. #don/rl

Sriwijaya FC Tolak Tantangan Semen Padang

Menjadi tim musafir karena tidak ada homebase saat ini, Sriwijaya FC tolak tantangan dari Semen Padang FC.

PALEMBANG, BP - Sriwijaya FC mendapatkan tantangan dari Semen Padang yang merupakan rivalnya di kompetisi Liga 2 untuk melakukan laga uji coba. Sayangnya, klub berjudul Laskar Wong Kito ini belum bisa melayani tantangan dari tim berjudul 'Kabau Sirah' itu karena beberapa alasan.

Hal tersebut diungkapkan Manajer Sriwijaya FC Hendri-asnyah, Rabu (27/7). Dikatakannya, saat ini yang menjadi kendala terbesar anak asuhan Liestiadi tersebut yakni perihal fasilitas lapangan yang belum memadai.

"Rencana uji coba kemarin ada melawan Semen Padang, mereka yang meminta, tapi karena di Palembang tidak memungkinkan untuk memakai stadion yang layak kita belum bisa layani tawaran itu," ungkapnya.

Kendati begitu, Hendri tak memungkiri kedepannya Sriwijaya FC akan melakukan laga pemanasan keluar kota,

jalang perhelatan turnamen Piala Indonesia dan kompetisi Liga 2.

"Untuk sementara ini, kita akan ke klub lokal dulu, tapi kedepannya kita akan tour menyesuaikan dengan waktu, jika tidak berbenturan dengan Piala Indonesia, kita akan lakukan," ucapnya.

Sementara itu, pada Sabtu (23/7/2020) Juli kemarin, Sriwijaya FC telah melakukan laga ujicoba perdana dengan mengalahkan dua tim lokal sekaligus dengan total kedudukan 13-0 di Stadion Tanjung Senai, Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir.

Anak asuh Liestiadi ini pada laga pertandingan pertama berhasil mengalahkan klub lokal Kabupaten Ogan Ilir, Tanjung Senai FC dengan skor 6-0. Kemudian pada pertandingan kedua Yu Hyun Koo dan kawan-kawan mengunduli klub Liga 3 David FC dengan skor telak 7-0.

Kendati anak asuhnya tersebut tampil 'gacor' dengan membantai lawannya di laga



STARTING ELEVENT - Pemain yang diturunkan saat laga uji coba yang digelar di Ogan Ilir beberapa waktu lalu.

ujicoba, namun Liestiadi mengaku belum puas dengan hasil tersebut.

Pasalnya, eks pelatih Persija Bogor ini mengakui laga ini bukanlah mencari kemenangan dengan skor besar, namun untuk mengukur kemampuan Amirul Mukminin dan kolega usai menggelar latihan perdana pada 8 Juli 2022 lalu.

"Belum puas, karena poin utama dalam uji coba ini kita

ingin lebih tahu kondisi fisik pemain setelah latihan dua minggu terakhir ini," sambung pelatih asal Medan ini.

Meskipun begitu, pelatih berlisensi A Pro AFC ini tak memungkiri jika performa skuad Laskar Wong Kito terlihat mulai membaik.

Namun, ia mengaku masih memiliki pekerjaan rumah untuk beradaptasi dengan anak asunya tersebut, terlebih

skuad Laskar Wong Kito dituntut harus membiasakan diri dengan skema latihan yang ia terapkan.

"Progres anak bagus, dalam dua minggu kita menitik beratkan fisik, karena mereka baru gabung latihan, mereka harus memahami lifestyle saya, karena style saya perlu fisik dan prima yang tinggi, pelan pelan kita kerjasama agar anak anak terbiasa," lanjutnya. #riz

Piala Indonesia Panggung Pemanasan PS Palembang

PALEMBANG, BP - PS Palembang terus matangkan persiapan jelang menghadapi Piala Indonesia dan Liga 3 Indonesia musim 2022. Laskar Segentar Alam sudah menggelar latihan sejak 14 Juli 2022 kemarin.

Klub kebanggaan masyarakat Kota Palembang ini tetap mempercayakan posisi Pelatih Kepala pada Jarot. Presiden PS Palembang Ratu Dewa, mengatakan, PS Palembang siap menghadapi dua kompetisi sepak bola musim ini. Baik Liga 3 maupun Piala Indonesia.

"Insy Allah, PS Palembang siap menghadapi Piala Indonesia dan juga Liga 3. Persiapan sudah kami lakukan.

Tim sudah mulai menggelar latihan di Stadion Kamboja, Palembang, sudah lebih satu minggu," kata RD, sapaan akrab Ratu Dewa, kepada sejumlah awak media di dampingi Direktur Media PS Palembang, Adi Zahri, Rabu (27/7).

Untuk Piala Indonesia sendiri, lanjut Ratu Dewa yang juga Sekda Kota Palembang ini, PS Palembang cukup realistis. Tak muluk-muluk PS Palembang tetap akan all out menghadapi setiap laga di Piala Indonesia.

"Kita cukup menjadikan ajang Piala Indonesia sebagai ajang uji coba. Target utama kita adalah Liga 3, agar bisa promosi ke Liga 2 musim

depan," terang dia.

Saat ini lanjut Ketua Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama (ISNU) Kota Palembang tersebut PS Palembang sedang memantapkan komposisi pemain. Sejauh ini sudah ada 22 pemain. Artinya ada tambahan lima pemain baru dari sebelumnya 17 pemain ada saat latihan perdana.

"Ya, ada lima lagi pemain baru, semua pemain lokal Sumsel," tukas dia.

Sementara itu Syamsul Anwar Asisten Pelatih PS Palembang mengatakan lima pemain yang baru tiga berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dan dua lainnya dari Musi Rawas.



LATIHAN - Presiden PS Palembang Ratu Dewa, melihat langsung latihan pemain PS Palembang jelang Piala Indonesia di Stadion Kamboja, Palembang, Rabu (27/7).

"Ya, yang dari OKU posisi gelandang dan striker. Sementara dari Musi Rawas posisi pemain belakang. Semua merupakan rekomendasi pelatih kepala kita Jarot," tukas dia.

Hanya memberi tahu musim ini PS Palembang menda-

pat tiket ikut Piala Indonesia karena musim lalu sukses tembus Babak 16 Besar Liga 3 Putaran Nasional. Piala Indonesia sendiri dijadwalkan bakal digelar Agustus nanti. Sementara Liga 3 bakal kick off setelah Liga 2 bergulir. #riz

Mariska Ditargetkan Tembus Semifinal

JAKARTA, BP - Gregoria Mariska Tunjung, dipatok target menembus semifinal di Kejuaraan Dunia Bulutangkis di Jepang, 22-28 Agustus 2022. Ajang itu sebagai bagian dari pembuktiannya sudah kembali ke performa awal.

Jorji, panggilan karib Gregoria Mariska, sempat dilanda penurunan performa sejak setahun belakangan. Hasil-hasil minor yang dicatatkannya pada sejumlah turnamen bulutangkis internasional menjadi catatan tersendiri.

Daya juang di lapangan dan kepercayaan diri menjadi salah satu faktor dirinya yang kerap kalah di babak-babak

awal. Tapi belakangan, Gregoria berhasil menunjukkan perbaikan. Terutama memasuki tur Asia Tenggara di Malaysia dan Singapura yang berlangsung 28 Juni sampai 3 Juli lalu.

Dari ketiganya, pemain berusia 22 tahun itu untuk kali pertama menembus semifinal Malaysia Masters 2022, sejak terakhir Denmark Open 2018. Setelah itu, terhenti di perempatfinal Singapore Open 2022.

Tak hanya itu, Gregoria juga mengalami perbaikan peringkat dari semula 31 dunia, kini menjadi ranking 26 dunia.

Meski sudah berhasil, hal itu rupanya belum bisa dijadikan patokan bahwa Gregoria sudah bisa disebut sudah konsisten. Untuk itu, PBSI mematok target lebih di kejuaraan yang lebih tinggi, khususnya Kejuaraan Dunia di Jepang, 22-28 Agustus 2022.

"Kemarin itu hasil Gregoria di Malaysia sudah lumayan tapi

belum bisa dijadikan pembuktian bahwa ia sudah bagus," kata Kabid Binpres PBSI Rionny Mainaky, dikutip dari detikSport, di Pelat-

nas PBSI, Cipayung.

Makanya di Kejuaraan Dunia akan diuji lagi. Jadi targetnya lebih tinggi lagi. Yang penting Gregoria,

staminanya dan sabarnya ditingkatkan lagi di lapangan. "Saya yakin dia bisa masuk ke semifinal," tuturnya. #riz



Muhammad Fariz

Kepala Dispopar Kabupaten Muba

Muba Usung 97 Medali Emas di POPDA Sumsel

SEKAYU, BP - Kontingen Musi Banyuwasin (Muba) akan ditargetkan mendulang 97 medali emas, pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XV Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) 2022 di Kota Palembang, pada 22 - 29 Agustus mendatang.

Menuju event tersebut, Pemkab Musi Banyuwasin (Muba) melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Muba melakukan Rapat Persiapan dengan beberapa Cabang Olahraga (Cabor) di Ruang Rapat Serasan Sekate, Selasa (26/7).

Rapat dipimpin langsung Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Musni Wijaya, disampaikannya bahwa Kabupaten Muba akan mengirim sebanyak 233 atlet untuk mengikuti POPDA Provinsi Sumsel.

Musni menerangkan, dari laporan seluruh Pengcab berbagai persiapan sudah dilakukan. Bahkan dirinya optimis atlet pelajar Kabupaten Muba bisa juara umum di POPDA Sumsel tahun 2022 ini.

"Penting menjadi perhatian agar semua Pengcab memperhatikan para atlet, jangan sampai kita menargetkan emas pada atlet tapi atlet mengalami kekurangan servis, baik dari segi akomodasi, konsumsi maupun lainnya. Harapan kita semoga target tidak meleset, bila perlu pencapaian lebih dari target dan semoga semua berjalan sesuai rencana kita," pungkas Pj Sekda Muba.

Menurut Kepala Dispopar Kabupaten Muba, Muhammad Fariz, pelaksanaan POPDA pada 22 - 29 Agustus mendatang akan dilaksanakan di Dining Hall JSC / Asrama Haji Km 10 Palembang.

Cabang Olahraga (Cabor) yang dipertandingkan sebanyak 24 Cabor, tetapi Kontingen Muba mengirimkan 20 Cabor. Empat Cabor yang tidak diikuti yaitu Gulat, Judo, Anggar dan Kempo.

"Total atlet, pelatih dan official yang akan dikirimkan pada POPDA kali ini, dengan rincian atlet putra sebanyak 120 orang, atlet putri 113 orang, pelatih 45 orang dan official 20 orang. Adapun target medali kontingen Muba pada POPDA XV tahun 2022 ini yaitu total medali yang diperebutkan sebanyak 349 dengan target emas sebanyak 97 medali emas," bebarnya.

Rapat turut dihadiri Anggota Komisi I DPRD Muba Alfian, perwakilan Kepala Perangkat Daerah Terkait dan seluruh perwakilan Pengcab yang akan mengikuti POPDA XV Tahun 2022. #riz



GETTY IMAGES/MIRCO LAZZARI/EP

Ducati akan coba menggaet Marc Marquez.

Ducati Gaet Marc Marquez?

SPANYOL, BP - Manajer Tim Ducati, Davide Tardozzi, mengisyaratkan akan berupaya menggaet Marc Marquez, di masa depan. Menyusul kepindahan adiknya, Alex Marquez, ke Gresini.

Alex telah memutuskan menyeberang ke Gresini mulai musim 2023. Pasalnya rider Spanyol itu gagal menunjukkan performa gemilang bersama LCR Honda usai pencapaian terbaiknya hanyalah sekali finis keempat (Algarve 2021), dan sudah sembilan kali retired.

Ducati sendiri sudah lama berminat ingin merekrut Marc Marquez. Andai adiknya sukses di Gresini, maka hal itu diyakini akan memuluskan jalan Marquez ke Borgo Panigale di 2025. Apalagi Ducati dan juara dunia delapan kali itu cukup akrab.

"Bagi kami, ini adalah sebuah iklan yang bagus, dalam kaitannya dengan kakaknya tentu dalam konteks bercanda. Menurut saya, Alex akan melapor kepada kakaknya tentang perbedaan Ducati dan Honda," ungkap Tardozzi kepada GPOne.

Dalam hal ini, pihaknya menyebut, hal itu akan menjadi sebuah kejutan yang menyenangkan.

"Tapi saya punya kepastian yang masuk akal bahwa Alex akan semakin oke dan akan mengatakan hal-hal baik tentang motor kami. Kami toh punya pembalap sendiri dan kami percaya dengan mereka. Ketika Alex mencoba motornya dan saya percaya dan berharap dia akan mencapai hasil-hasil tertentu," lugas Tardozzi. #riz



Gregoria Mariska Tunjung

Instagram.com/@go.greogoo

Sekolah Pasar Modal

KANTOR PERWAKILAN BEI SUMATERA SELATAN
EOISI JULI 2022

SPM ONLINE	SPM OFFLINE
JUM'AT, 08 JULI 2022 14.00 - 16.00 WIB RABU, 13 JULI 2022 14.00 - 16.00 WIB RABU, 27 JULI 2022 14.00 - 16.00 WIB 	SABTU, 16 JULI 2022 09.00 - 16.00 WIB SABTU, 23 JULI 2022 09.00 - 16.00 WIB

MELALUI APLIKASI :

link Pendaftaran Online:
https://bit.ly/regis_spm_online_juli2022

link Pendaftaran Offline:
https://bit.ly/regis_spm_offline_juli2022

THE GADE COFFE & GOLD
 Jl. POM IX (Ruko Palembang Square)
 Ilir Barat I

TEMPAT TERBATAS, SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA

Media Partner: **BERITAPAGI**

Pilkada Halal Tidak Bisa Instan

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Ia optimistis pemilu bersih bisa diwujudkan dengan catatan, semua pihak mendukung. Karena regulasi sudah baik lembaga yang dibentuk sudah baik tinggal pelaku penyelenggara pemilu dan objek yang terlibat pemilu sendiri harus didorong lebih baik ke depan. "Pemilu bersih, harus bisa 1," Yulfa memungksi.

Senada, pengamat politik dari Universitas Sriwijaya Bagindo Togar mengatakan, istilah pemilu halal ini hanya istilah yang diutarakan dosen UI Chusnul Mar'iyah namun ada istilah lainnya adalah pemilu bersih, pemilu yang partisipatif dan istilah lainnya, intinya pemilu yang berjalan sesuai kaidah.

"Kalau dikatakan apakah bisa, ya bisa tapi tidak semudah itu. Untuk kita berharap 10 tahun ke depan belum bisa realitas itu kita dapatkan," kata Bagindo.

Karena dari sisi undang-undang yang masih memberikan ruang untuk terjadinya kecurangan, begitu juga dari sisi penyelenggara dari sisi elit dan tujuan politik. Sehingga tidak mudah mewujudkan pemilu bersih.

"Kalau harapan ya semua kita maunya seperti itu, apalagi kalau lihat mirisnya para elit politik sekarang baik di legislatif dan eksekutif dan kalangan partai politik, hal biasa mereka karena masih menganut teori Machiavelli, bukan salah benar salah tapi menang kalah. Sampai hari ini teori Machiavelli masih awet di dunia politik," katanya.

Menurutnya, tak hanya Indonesia, di negara-negara maju seperti Amerika dan Prancis yang sudah ratusan

tahun berdemokrasi masih saja terjadi.

Bagindo memberikan solusi dan jawaban bagaimana Sumsel bisa menuju pemilu bersih, yakni demokrasi berbasis teknologi yang dipercaya bisa memperkecil ruang terjadinya praktek politik yang melanggar sistem.

Ia mencontohkan penerimaan pegawai yang sudah berbasis teknologi maka tidak akan bisa macam-macam, sistem pembayaran pajak menggunakan teknologi juga bisa mengurangi terjadinya calo.

Sehingga praktek dan pelaksanaan sistem demokrasi dalam pemerintahan dapat diupayakan dengan teknologi misal menggunakan e-voting. "Kalau sudah berbasis teknologi seperti di Korea paling tidak meminimalisir terjadinya praktek kecurangan dalam sistem demokrasi," kata Bagindo. Terkadang juga saat pemilu bersih akan dijalankan, namun political will elit tidak bersedia karena menutup dan mengurangi terjadinya kecurangan. Sehingga akan ada elit yang tidak setuju karena tidak bisa politik uang dan tidak bisa mereka lagi.

"Makanya kalau berani totalitas mengandalkan ekonomi dalam pelaksanaan sistem pemilu bisa mengarah ke pemilu bersih, paling tidak 70 persen legalitas pemilu halal akan kita temui dan nanti perlahan-lahan sampai ke tingkat 90 persen," ia menuturkan.

Ubah Undang Undang

Sementara itu, Nopran Marjani, SPd salah satu anggota DPRD Lahat dari partai Gerindra mengatakan, pemilu bisa saja halal apabila perang-

kat hukumnya memang benar-benar menjalankan tupoksinya.

"Menurut saya, sebagai pelaku di pilkada dan pileg, memang undang-undang kita perlu diubah. Jika tidak maka tidak akan bisa halal, karena undang-undang kita saat ini tidak begitu spesifik mengenai pelanggaran yang ada," kata Nopran.

Ia mencontohkan, saat ada kepala daerah yang melakukan politik uang, tidak akan didiskualifikasi jika dananya bukan dari calon bersangkutan. "Jadi kalau dananya dari keluarga, tim sukses, istri itu tidak akan terkena, menurut saya undang-undang harus diubah. Apabila calon itu melakukan politik uang baik sumbarnya dari teman, kerabat sponsor maka akan didiskualifikasi," Nopran menuturkan.

Menurutnya, fakta di lapangan saat ini dapat dibuktikan dan didapatkan berapa kali terjadi money politik, namun alasan pelaku bukan uang bersangkutan. "Non sense (omong kosong), kalau undang-undang setengah hati dan abu-abu karena masih akan ada celah, peluang curang masih terbuka," ia menegaskan.

Ia berpendapat, kandidat kepala daerah bisa saja tidak mengeluarkan banyak uang, caranya dengan mengubah undang-undang, yakni pemilihan langsung oleh DPR. "Kan DPR bisa diawasi KPK, ponsel bisa disadap," ucap dia.

Bendahara DPD PDIP Sumsel, Yuda Rinaldi mengatakan, pemilu jurdil atau pemilu halal bisa saja diwujudkan asalkan peserta penyelenggaranya, bertindak sesuai aturan. Jika terjadi kecurangan saat pe-

milu, maka membuat peserta lain dirugikan.

"Bagian pengawas seperti Bawaslu kalau ada pelanggaran ya ditindak, kalau memang harus di diskualifikasi pesertanya ya harus didiskualifikasi, jangan pilih pilih. Penyelenggaranya, Bawaslu, KPU, peserta pemilu dan masyarakat juga jangan pragmatis," kata Yuda.

Masyarakat juga dimintanya untuk memilih calon bukan hanya dari sisi pragmatis dan transaksional, mewujudkan pemilu bersih masyarakat juga harus berperan. "Kalau masyarakat tidak transaksional mungkin pemilu akan berjalan sesuai dengan kita inginkan yang sama-sama," katanya.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Sumsel, Hasbi Asadiki menambahkan, pemilu jurdil dan halal sudah menjadi asas pemilu. "Kami komitmen dengan itu saat pemilu," kata Hasbi.

Pemilu jurdil bisa diwujudkan asalkan aturan dijalankan sebagaimana mestinya, baik penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. "Sekarang tinggal ketegasan menjalankan aturan itu, kita harap masyarakat juga bijak menentukan hak pilih mereka," katanya lagi.

Aturan Agama

Sedangkan anggota Bawaslu Sumsel Junaidi SE MSi mengaku, istilah pemilu halal ini sesuatu yang baru terdengar. "Pernah terdetik di hati saya bagaimana pemilu halal itu, sesuai aturan agama," katanya. Soal regulasi menurutnya regulasi sudah diatur dengan baik, namun untuk penyelenggara pemilu bisa saja halal bisa saja haram. "Halal ini

yaitu menjalankan yang benar dan tidak melakukan kegiatan manipulasi, korupsi dan kecurangan, kalau berbalik maka jadi penyelenggara haram," kata Junaidi.

Menurutnya bidang pengawasan juga bisa saja haram dan bisa halal, jika pengawas bermain dengan pelaku politik maka bisa haram, namun jika menyelenggarakan tupoksi dengan baik maka bisa halal dan berfaedah. Karena ini tugas bela yang harus

mendapatkan apresiasi, yang ujungnya menjalankan amanah dengan baik akan mendapatkan pahala maka artinya halal.

"Tapi yang membuat pemilu itu menjadi haram atau halal itu sesungguhnya pelaku dan aktor politik yang lebih cenderung banyak menciderai pemilu itu sendiri. Misal mulai dari bagaimana dia mendapat uang kampanye yang bisa saja halal bisa haram, apakah dari uang kebun, uang tabungan, uang usaha,

atau uang hasil menekan, hasil korupsi yang tentu bersumber dari yang haram," ia menegaskan.

Junaidi mengajak semua pihak menggaungkan bersama-sama politik itu adalah santun dan menjual gagasan. Selain regulasi, penyelenggara, pengawas, pelaku politik maka poin terakhir menuju pemilu yang bersih atau istilah baru pemilu halal, maka faktor masyarakat itu sendiri juga harus mendukung. #udi/gus

Rampung S2, Bikin Sinetron ...

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

"Dulu cita-cita gue itu," sahat Wishnutama.

Maudy juga menjelaskan alasannya itu, karena menurutnya sinetron banyak ditonton oleh masyarakat sehingga dia dapat menyampaikan nilai serta moral yang positif melalui sinetron yang berkualitas.

"Karena di situlah paling sering ditonton orang. Jadi kalau aku punya budget nggak

bikin film, bikin sinetron yang gimana caranya entertaining tapi *really smart*, banyak nilai moral --moral yang positif," kata Maudy.

"Dulu cita-cita Mas Tama juga gitu ya?" tanya Maudy kepada Wishnutama.

Ternyata Wishnutama juga memiliki cita-cita yang sama dengan Maudy, namun dirinya merasa sudah selesai di dunia

media dan berharap ada seseorang yang dapat melanjutkan cita-citanya tersebut.

"Dulu waktu bikin 'Tetangga Masa Gitu' ya Mod. Cita-citanya gitu Mod, kalau gue dengan dunia media, gue ngerasa gue udah selesai. Tapi mudah-mudahan ada yang lanjutin cita-cita itu untuk bangsa ini pintar melalui medianya," jawab Wishnutama. #ihd

Mantap Koalisi

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Isu koalisi Gerindra dan PKB mengemuka setelah pertemuan Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar di kediaman Prabowo di Jakarta pada 18 Juni 2022. Prabowo maupun Muhaimin Iskandar menegaskan kecokokannya dalam bekerja sama menghadapi Pemilu 2024.

Setelah pertemuan elite kedua partai di Hotel Mulia, Jakarta, pada 22 Juni 2022, kerja sama kedua belah pihak semakin kokoh menyusul pertemuan pengurus pusat dan pengurus wilayah setiap partai di Gedung Senatama, Kwitang, Jakarta, 30 Juni 2022.

Huda menyampaikan, piagam deklarasi akan menjadi fondasi kerja sama bagi Gerindra dan PKB. Piagam deklarasi akan mengatur langkah-langkah kerja sama politik yang akan dilakukan kedua belah pihak.

"Piagam deklarasi ini seperti konstitusi yang menjadi landasan kerja sama para pihak, yang nantinya akan diterjemahkan dalam kesepakatan lebih detil di kemudian hari," ujar Huda.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas tentang waktu peresmian deklarasi. Sesuai budaya Nusantara, pemilihan waktu ini dihitung dengan cermat sehingga memenuhi unsur kebaikan, baik dari sisi spiritual maupun taktis politisnya.

Huda belum bersedia membocorkan kapan waktu peresmian deklarasi tersebut. Ia hanya menyebut, peresmian deklarasi tidak akan lewat dari perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2022. "Kami belum bisa sampaikan waktu tepatnya, tetapi insya Allah tidak akan jauh dari perayaan HUT kemerdekaan (negara) kita," ucap Huda.

Untuk diketahui, dalam Pemilu Legislatif 2019, Gerindra meraih 78 kursi atau 12,57 persen dari total kursi di DPR. Kemudian, PKB mendapatkan 58 kursi atau 9,69 persen. Dengan begitu, jika kedua partai tersebut berkoalisi, total terdapat 136 kursi atau 22,26 persen.

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mereka sudah memiliki tiket untuk men-

gusung calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Dalam UU tersebut diatur, hanya parpol atau gabungan parpol yang menguasai minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh paling sedikit 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya yang bisa mengisng capres-cawapres.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Irfan Yusuf Hasyim enggan membeberkan apakah kedekatan antara Gerindra dan PKB ini menjadi sinyal bahwa Prabowo dan Muhaimin akan diungus oleh koalisi pada Pilpres 2024 nanti. "Kita tunggu saja," katanya.

Irfan menegaskan, semua kader Gerindra solid mendukung Prabowo maju sebagai capres. Tak ada nama kader lain muncul untuk dijagokan dalam Pilpres 2024. Desakan pengurus Partai Gerindra itu akan dijawab oleh Prabowo dalam momentum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Gerindra, yang akan digelar pada Sabtu (30/7/2022) di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. #ihd

Ada Pijat Mesum di Samping Masjid.....

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

ihwal praktik menyimpang tersebut dikeluhkan warga baik langsung maupun melalui media sosial.

Sore kemarin, Rabu (27/7), tim *BeritaPagi* mengecek ke kawasan Jalan Brigjen Hasan Kasim atau biasa disebut Celentang. Pesisir di seberang jalan perumahan mewah Green Garden, masuk kiri sekira 50 meter dan bertemu beberapa ruko. Sekilas hanya ada satu yang terbuka dan beraktivitas, yaitu sebuah perusahaan ekspedisi.

Kalau tidak jeli, pasti tak tahu di sana ada salah satu ruko berisikan PPUM (Panti Pijat Urut Modern) Flow. Karena tidak ada papan nama yang mencolok, pintu teralis juga hanya buka paling hanya satu meter saja. Terlihat pintu kaca berwarna hitam dan ada tulisan 'flow' saja.

Bermula postingan Instagram akun @palembang_bedesau.id pada Senin (25/7) lalu yang memuat laporan netizen kalau ada panti pijat yang beroperasi dekat masjid di kawasan Jalan Bintang RT 44 RW IX kelurahan Bukit Sangkal Kalidoni. Dalam postingan tersebut netizen mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran.

Bermodal informasi dari sumber *BeritaPagi*, tim menghubungi pengelola PPUM Flow yang biasa disebut Mami V dengan nomor WA 0877970790xx. Dari komunikasi tersebut didapat informasi kalau PPUM ini masih tetap buka seperti biasa walau viral di medsos.

Pantauan tim *BeritaPagi*, antara pagar masjid Al Ikhsan di kawasan tersebut dan ruko hanya dibatasi dinding saja tanpa ada bangunan lainnya. Posisi bangunan ruko dari jalan raya Brigjen Hasan Ka-

sim hanya berjarak sekitar 50 meter.

Menurut masyarakat sekitar, PPUM tersebut baru buka awal Juni lalu setelah hari raya Idul Fitri. Warga tahu karena banyak karangan bunga yang berjejer di sepanjang jalan menandai peluncuran Flow.

Masuk dalam ruko, biasanya langsung disambut oleh Mami V dengan menyodorkan gambar perempuan yang disebutnya sebagai 'therapist'. Rata-rata berusia 20 tahunan. Bagi pelanggan biasanya bisa langsung pesan melalui WA Mami V. Kabarnya kalangan hidung merah sudah tahu mana saja therapist yang 'bagus'.

"Sekarang malah pelayanan di sana lebih spesial lagi, ada disiapkan kamar sekaligus *bathup* di dalamnya. Memang sih sedikit berbeda dengan kamar biasa, Rp150 ribu per jam belum termasuk ceweknya," ujar sumber *BeritaPagi*.

Apa semua cewek biasa melayani plus-plus? Menurut sumber ini, semua therapist bisa melayani lebih dari sekadar pijat dengan tarif kisaran Rp200 - 300 ribu untuk satu jam. Berarti tiap pelanggan harus merogoh kocek Rp350 - 450 ribu untuk menikmati kencana sesaat di sana.

Disesalkan

Wakil Ketua DPRD Palembang, Raden Muhammad Yusuf Indra Kesuma, menyayangkan berdirinya beroperasinya panti pijat Flow di samping Masjid Al-Ikhsan. Atas dasar itu, politisi PDIP ini meminta agar Pemkot Palembang, melalui DPMPSTP Palembang dan dinas terkait lainnya, mengecek kembali semua perizinan tempat usaha tersebut. Mengingat munculnya gejala dan de-

sakan dari masyarakat sekitar agar usaha tersebut ditutup.

"Kok bisa usaha seperti itu berada di dekat masjid. Saya sebagai pimpinan di DPRD Palembang meminta agar Pemkot Palembang lebih selektif dalam memberikan izin, terutama yang berkaitan dengan masyarakat luas, kami sangat mendukung investasi di kota ini, tapi harus tetap mengedepankan cara-cara baik artinya jangan sampai menimbulkan penolakan dari masyarakat," katanya, Rabu.

Ketua pengurus Masjid Al-Ikhsan, Suhandi Hanarul, mengatakan, jamaah masjid resah dengan keberadaan spa yang letaknya berdekatan dengan masjid.

"Kami menyoal agar Pemkot Palembang mencabut izin tempat usaha esek-esek yang berkedok SPA ini, kami tidak mau wilayah ini dijadikan tempat maksiat seperti ini," kata Suhandi.

Salah seorang pengurus Masjid Al-Ikhsan, Paisi Akbar, mengatakan, pihaknya sudah mendengar laporan dari salah satu konsumen Flow, di mana tempat itu memang benar dijadikan tempat prostitusi.

"Usaha ini sudah ada sekitar dua bulan terakhir. Keterangan dari konsumen panti pihat Flow, memang ada praktik protitusi, pernah membayar Rp500 ribu dengan terapis *full service* sudah termasuk biaya kamar, posisi kamar berpintu dan dikunci, tidak disediakan celana pendek untuk konsumen ganti, lokasi ruangan remang-remang," kata Paisi menceritakan laporan konsumen panti pijat Flow.

Ia mengaku, untuk perizinan memang ada, tapi pi-

haknya menganggap melanggar peraturan, karena usaha tersebut tidak sesuai peruntukannya.

"Kami sudah melayangkan surat keberatan kepada Pemkot Palembang, melalui, DPMPSTP Palembang, untuk mencabut izinnnya, jangan sampai terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, kami menolak untuk bertemu dengan *owner*," ujarnya.

Sementara itu, kasat Pol PP kota Palembang, Edwin Effendi, mengatakan, pihaknya sudah mengupayakan untuk mendiasi antara warga dan *owner* Flow, yang akan dilaksanakan pada Kamis (28/7).

"Kami tidak bisa langsung menutup usaha tersebut, karena mereka sudah mendapat izin dari Pemkot Palembang dan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, jadi kami harus persuasif dahulu," katanya.

Camat Kalidoni, M Rama Cahya Putra mengatakan, pihaknya sudah mengakomodir keinginan warga, dengan cara berkirim surat kepada pengelola Flow.

"Sudah kami kirim surat, yang isi poinnya bertanya apakah benar usaha tersebut esek-esek. Kemudian dijawab dengan surat oleh Flow, bahwa usaha tersebut merupakan spa," katanya.

Sebelumnya, Owner Flow SPA, Junaidi, membantah usaha miliknya ada tempat usaha esek-esek. Bahkan ia menyebut, usahanya itu sudah ada perizinan yang lengkap dari dinas terkait.

"Tidak ada prostitusi, kami sebagai warga berhak mendirikan usaha dimanapun, spa ini memang benar mempekerjakan wanita sebagai terapis, standar spaterapisnya memang wanita," katanya. #muk/tim

Berkat Dodi, Limbah Gambir Dikenal

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

untuk terus dilestarikan dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Muba.

Dodi sekaligus mampu menjawab isu internasional bahwa di Muba dapat menghasilkan tekstil tanpa limbah kimia, dan sebagai kontribusi untuk dunia tekstil yang ramah lingkungan. Gambo Muba telah dikenal di arena "Miss Supranational 2021" yang digelar di Polandia, dengan busana yang dirancang oleh desainer nasional terkemuka Defricio Audy, dipakai

oleh Jihane Almira Chedid yang merupakan wakil dari Indonesia di ajang bergengsi tersebut.

Tahun 2018 Gambo Muba dikenal pada Acara "Closing Ceremony Partnership Program Light-house Schools-Public Schools in Margaret River School di Australia. Iriana Jokowi Ibu Negara, pada suatu acara Tahun 2019, memberi apresiasi bahwa Gambo Muba adalah karya orang lokal namun kualiti

tasnya internasional, di mana produk Gambo Muba telah mengangkat kearifan lokal dan memberikan kontribusi positif bagi petani gambir dan pengrajin Gambo Muba.

Masyarakat Muba harus bangga karena Gambo Muba saat ini telah dikenal di mancanegara, sudah mendunia. Gambo Muba ini sebagai produk juga dapat diaplikasikan untuk fesyen hingga industri interior. Penggunaan pewarna alami getah gambir

ini dapat diaplikasikan dengan bahan-bahan industri interior seperti bahan velvet interior, vitrage, tenun dan linen. Buah Karya Dodi dan Thia ini telah menghantar Kabupaten Musi Banyuasin meraih penghargaan Best Design Fashion Show yang diadakan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (AP-KASI) Otonomi Daerah Expo 2022 di Jakarta pada Tanggal 24 Juli 2022 yang lalu. Selamat dan sukses buat Muba. #ajb

tidak jujur dan tidak adil. Mencari jabatan Kepala Daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota atau anggota legislatif di berbagai jenjang pada kegiatan Pilkada, Pilleg, dan Pilpres, merupakan bagian dari kehidupan dunia sebagai median persediaan dan persiapan untuk menuju kehidupan akhirat yang kekal sepanjang zaman.

Bagi semua Pihak apakah itu sebagai penyelenggara, calon pemimpin atau calon anggota legislatif di tiap tingkatannya, kader politik dan warga biasa harus

baru menemukan memang idak langsung tau siapa yang punya kelepeh itu. Perlu waktu yang panjang untuk nelusuri siapa yang punya,

baru kemudian telacak kalau itu punya Paul.

Dak dijelaskan ado apo idak duit di Jero kelepehnyo itu, tapi Paul Grisham seneng

nian pacak ketemu lagi kelepehnyo itu. Pacak bae walau katek duitnyo tapi banyak memori dengan kelepehnyo itu. Yo dak Mang Paul? #muk

Massa Kembali Geruduk ..

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

posisi direksi, komisaris dan manajemen di bawahnya. Gubernur Sumsel juga diminta tidak menempatkan ASN yang tidak produktif bagi kemajuan PT JSC. Selain itu, Germaki meminta manajemen PT JSC sekarang membuka neraca keuangan secara transparan.

Ditambahkan, Germaki mendesak dibentuk tim khusus menyelamatkan aset Rp5,7 triliun dari Badan Usaha Milik Daerah PT JSC tersebut.

Aksi massa terkait penggantian direksi PT JSC ini bukan hanya kali ini. Sebelumnya sejumlah aktivis menemui Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noerinhgati

untuk meminta DPRD merekomendasikan penggantian Meina Paloh dari jabatannya direktur utama PT Jakabaring Sport City.

Menurut salah satu aktivis, Denny Tegar bahwa untuk membangun Jakabaring Sport City sebelum ini serta menyelenggarakan event-event besar dibutuhkan kecerdasan dan visi luar biasa.

"Memperjuangkan Jakabaring ini kalau tidak mempunyai kemampuan intelektual dan terutama gambler orang yang berani bertaruh ini (terbanggunya JSC -red) tidak mungkin. Karena saya tahu sejarahnya bagaimana Pak Alex Noerdin melobi ke

luar negeri itu saya tahu ceritanya," ujar Denny Tegar.

Untuk itu menurut Denny Tegar, penting untuk dipecat Meina Paloh dan digantikan orang lebih baik karena banyak sekali kesalahan yang sudah diperbuatnya selaku direktur utama PT JSC. Jika ada perbuatan melawan hukum, pihaknya juga tak segan akan melaporkan yang berwajib.

Sampai berita ini diturunkan belum ada tindak lanjut yang konkret baik dari Gubernur Herman Deru maupun Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noerinhgati untuk mengganti manajemen PT Jakabaring Sport City. #hus

Pilkada Halal?

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Penggunaan kata halal yang disandingkan dengan kata Pemilu atau Pilkada tentunya harus dimaknai, sebagai orang yang beragama, bahwa hidup manusia itu harus beribadah dan ada tujuannya untuk mencari ridhanya.

Diharapkan ada rasa takut untuk berlaku curang, tidak jujur dan tidak adil. Mencari jabatan Kepala Daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota atau anggota legislatif di berbagai jenjang pada kegiatan Pilkada, Pilleg, dan Pilpres, merupakan bagian dari kehidupan dunia sebagai median persediaan dan persiapan untuk menuju kehidupan akhirat yang kekal sepanjang zaman.

Bagi semua Pihak apakah itu sebagai penyelenggara, calon pemimpin atau calon anggota legislatif di tiap tingkatannya, kader politik dan warga biasa harus

baru menemukan memang idak langsung tau siapa yang punya kelepeh itu. Perlu waktu yang panjang untuk nelusuri siapa yang punya,

baru kemudian telacak kalau itu punya Paul.

tahu, faham dan melaksanakan Pemilu yang jurdil atau "halal".

Bagi insan yang taat beragama untuk bertawasul dalam bentuk ketawadu'an atau kerendahan hati sebagai seorang hamba di hadapan Tuhannya untuk komitmen dan konsisten melakukan Pemilu Halal. Buah dari Pemilu Halal tentunya menebar banyak berkah bagi masyarakat dan lingkungan yang 'baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur', menciptakan negeri yang damai, makmur dan sejahtera. #ajb

Kalu Rezeki Dak Kemano

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Tahapan Pemilu 2024

- Penyusunan peraturan KPU (14 Juni 2022 – 14 Desember 2023)
- Pemutakhiran data pemilih (14 Oktober 2022 – 21 Juni 2023)
- Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (29 Juli 2022 – 13 Desember 2022)
- Penetapan peserta pemilu (14 Desember 2022)
- Penetapan jumlah kursi dan dapil (14 Oktober 2022 – 9 Februari 2023)
- Pencalonan anggota DPD (6 Desember 2022 – 25 November 2023)
- Pencalonan DPR dan DPRD (24 April 2023 – 25 November 2023)
- Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (19 Oktober 2023 – 25 November 2023)
- Kampanye (28 November 2023 – 10 Februari 2024)
- Masa Tenang (11-13 Februari 2024)
- Pemungutan suara (14 - 15 Februari 2024)
- Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (15 Februari 2024 – 20 Maret 2024)

Penetapan Hasil Pemilu

Tidak terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (Paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi).
Terdapat permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (Paling lambat 3 hari pasca putusan Mahkamah Konstitusi).
Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih
Penetapan Perolehan kursi dan calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.
Penetapan calon terpilih anggota DPD.

Pengucapan Sumpah

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota (Disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing Anggota).
DPR dan DPD (1 Oktober 2024).
Presiden dan Wakil Presiden (20 Oktober 2024).

GRAFIS : MAD



(BP/IDUDY OSKANDAR)

Suasana peresmian Sekretariat Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Nusantara Provinsi Sumsel di D'Matto Milenial Art di Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, Selasa (26/7).

PKN Sumsel Punya Magnet Kuat

PALEMBANG, BP - Magnet Pimpinan Daerah (Pimda) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Sumsel kian besar jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, bahkan dua mantan kepala daerah dan satu petinggi partai menyatakan minat gabung di Partai baru besutan Hj Lucianty ini.

Sekretaris Pimda PKN Sumsel H Syaiful Islam mengaku, jika PKN Sumsel memiliki magnet yang kuat, PKN sudah bergerak konsolidasi ke 17 Kabupaten/kota dan ke 240 kecamatan di Sumsel.

Saat ini PKN Sumsel juga menjadi daya tarik banyak pihak yang ingin bergabung, seperti ada dua mantan kepala daerah yang siap bergabung dengan Pimda PKN Sumsel," kata Syaiful, Selasa (26/7).

Namun sayang mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel ini enggan menyebut identitas dua mantan kepala daerah tersebut. Begitu juga saat ditanya apakah kepala daerah tersebut Guber-

nur, Walikota atau Bupati di Sumsel.

"Yang pasti kepala daerah. Nantilah ada saatnya akan kita umumkan ke publik," ucap Syaiful.

Tidak hanya mantan kepala daerah tersebut, Syaiful juga mengungkapkan ada sejumlah tokoh masyarakat yang sudah bergabung dengan Pimda PKN Sumsel, diantaranya salah satu petinggi salah satu Universitas di Palembang.

"Alhamdulillah kita bersyukur ada juga pimpinan Universitas yang sudah menyatakan gabung bersama Pimda PKN Sumsel," katanya.

Gabungnya dua mantan kepala daerah dan juga pimpinan universitas ini diyakininya akan mendongkrak kantong suara PKN di Sumsel pada Pemilu 2024.

"Jelas ini akan menjadi motivasi tersendiri bagi kami para pengurus Pimda PKN Sumsel. Kita akan terus berjuang untuk kepentingan masyarakat. Kita akan selalu hadir langsung di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan uluran tangan," ia memungkasi. #udi

Lusi Siap Maju Pilkada

PALEMBANG, BP - Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Sumatera Selatan (Sumsel) menyiapkan strategi khusus menarik simpati masyarakat di Pemilu 2024 yang akan datang. Partai yang dideklarasikan 28 Oktober 2021 lalu itu memiliki misi menduduki parlemen di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional dan optimistis bisa meraihnya.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Pimpinan Daerah (PIMDA) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Hj Lucianty SE didampingi Sekretaris PIMDA PKN Sumsel, Ir H Syaiful Islam, usai membuka dan meresmikan Sekretariat Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Nusantara Provinsi Sumsel di D'Matto Milenial Art di Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, Selasa (26/7).

Lucianty berharap, setiap daerah pemilihan (Dapil) di Sumsel akan terwakili dengan kader-kader terbaik PKN. "Kita mengharapkan Sumsel menyumbangkan dua kursi untuk DPR RI, karena target kita PKN harus lolos parliamentary threshold (PT) secara nasional," katanya yang optimistis PKN memenangkan pemilu.

Selain itu, PKN juga sudah sudah masuk ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nasional. Ia menargetkan dengan semangat gotong royong partai ini akan menduduki parlemen baik di tingkat Kota/Kabupaten, Provinsi, dan DPR RI.

"Pimpinan cabang partai kita di kabupaten/kota sudah 100 persen dan pimpinan kecamatan sudah mencapai 94 persen, mudah-mudahan nanti ke depan diberikan jalan yang lancar mohon doa-nya sehingga PKN bisa ikut dalam Pemilu 2024," ia menuturkan.

Lucianty menambahkan, agar lebih dikenal masyarakat PKN Sumsel mempunyai beberapa strategi salah satunya menjadikan partai ini disukai kaum milenial.

Saat disinggung terkait isu dirinya akan maju dalam Pilkada Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mendatang, Hj Lucianty SE mengaku akan melihat hasil perolehan suara PKN mendatang.

"Apabila PKN landing dengan baik, Insya Allah saya akan mengikuti apa diinginkan masyarakat untuk mengabdikan kepada masyarakat Musi Banyuasin," katanya.

Sementara itu, Dewan Penasihat PIMDA PKN Sumsel, Drs H M Albahori mengatakan saat ini PKN Sumsel memfokuskan bagaimana agar partai ini bisa ikut pemilu 2024.

LIPUTAN KHUSUS BERITAPAGI

Referensi Politik Terkini



Untuk tujuan tersebut PKN Sumsel akan menyiapkan kader-kader terbaiknya masuk ke dalam parlemen. Ia menyebut tantangan saat ini ialah bagaimana membangun popularitas partai ini di masyarakat.

"Ya tentu dengan strategi komunikasi politik untuk menarik simpati masyarakat, baik siapa tokoh yang ideal untuk kita promosikan, media dan pesan apa yang ingin kita gunakan sehingga diharapkan simpati masyarakat akan jauh meningkat," ia memungkasi. #udi



Kita mengharapkan Sumsel menyumbangkan dua kursi untuk DPR RI, karena target kita PKN harus lolos parliamentary threshold (PT) secara nasional.

Ir Hj Lucianty, SE



BP/ISTIMEWA